



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2005 – 2025**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(R P J P D)**

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
 - b. bahwa dengan mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, maka penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992, Nomor 12 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 48 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2005 – 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Yogyakarta;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penjabaran dari RPJPD ini akan ditindaklanjuti dalam RPJMD.

Pasal 4

Dalam menyusun materi kampanye yang berisi visi, misi dan program pembangunan daerah, Calon Kepala Daerah berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.
 - (3) Dengan diberlakukannya RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025, maka pada dua tahun pertama masa berlakunya RPJPD Kota Yogyakarta untuk tahun 2005 – 2006 telah dilaksanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta yaitu Pola Dasar Pembangunan, Program Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Daerah Tahun 2002 – 2006.
 - (4) Untuk masa Pemerintahan Kepala Daerah periode tahun 2022–2026 berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 April 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 25 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini, Pemerintah Kota berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kota Yogyakarta.

RPJPD Kota Yogyakarta sebagai dokumen perencanaan pembangunan kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Yogyakarta (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJPD Kota Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dan menjadi pedoman di dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini dengan pendekatan Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, yang menggambarkan struktur permasalahan yang dihadapi sebagai masukan dan pencapaian hasil pembangunan yang kemudian dianalisis untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka RPJPD Kota Yogyakarta memuat visi yaitu **Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan**, dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

RPJMD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai kewenangan untuk menyempurnakan RKPD dan APBD tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan APBD.

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Penyusunan RPJPD tahun berikutnya, dimaksudkan untuk menghindari kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya RPJPD Tahun 2005 – 2025.

Pasal 6

Cukup jelas

-----*****-----



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2005 – 2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1.1. Sejarah Pembentukan Kota Yogyakarta	1
1.1.2. Perkembangan Perencanaan dan Penataan Kota Yogyakarta....	4
1.1.3. Pengertian RPJPD Kota Yogyakarta.....	8
1.1.4. Proses Penyusunan RPJPD Kota Yogyakarta.....	8
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.3. LANDASAN HUKUM.....	9
1.4. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA .	9
1.5. SISTEMATIKA.....	10
BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA YOGYAKARTA.....	12
2.1. KONDISI DAN ANALISIS.....	12
2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup.....	12
2.1.2. Demografi.....	17
2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	21
2.1.4. Sosial Budaya dan Politik.....	28
2.1.5. Sarana dan Prasarana	33
2.1.6. Pemerintahan	38
2.1.7. Pendidikan.....	41
2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA YOGYAKARTA.....	45
BAB III VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2005 – 2025	49
3.1. VISI PEMBANGUNAN	49
3.2. MISI PEMBANGUNAN.....	51
3.3. ARAH PEMBANGUNAN	53
3.3.1. ARAH PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA.....	53
3.3.2. SASARAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA.....	66
3.3.3. SASARAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN	70
3.3.4. PERAN SUB WILAYAH PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA.....	71
BAB IV PENUTUP	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Sejarah Pembentukan Kota Yogyakarta

1. Sejarah panjang pembentukan Kota Yogyakarta diawali dengan berdirinya Kerajaan Mataram yang merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan di bawah kekuasaan Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, kekuasaan Kerajaan Mataram meluas ke seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan bahkan sampai Kalimantan. Sesudah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Kerajaan Mataram menjadi lemah dan bahkan penguasa selanjutnya berada di bawah pengaruh kolonial Belanda.
2. Sultan Amangkurat II, cucu Sultan Agung, masih mampu mengendalikan pemerintahannya. Tetapi sesudah itu, kekuasaan diperebutkan antara Sunan Mas (Sunan Amangkurat III) dengan Pangeran Puger yang kemudian menyebut dirinya sebagai Sunan Pakubuwono I. Sementara itu Belanda dengan segala daya upaya mendalangi perpecahan ini, sehingga kewibawaan Mataram semakin pudar. Pada masa selanjutnya, Sunan Paku Buwono III (putra Sunan Paku Buwono II) diangkat oleh Kompeni sebagai penguasa Mataram. Dengan penobatan ini, Pangeran Mangkubumi (saudara Sunan Paku Buwono II) yang sudah berada di Yogyakarta merasa tidak rela karena tidak puas dengan kebijakan-kebijakan Sunan Paku Buwono II serta campur tangan Kompeni yang terlalu banyak dalam penyelenggaraan pemerintahan di Mataram, sehingga terjadi pertikaian saudara di Mataram.
3. Pangeran Mangkubumi dengan dibantu Raden Mas Said (Adipati Mangkunegoro) melakukan perlawanan terhadap Belanda yang diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 dengan kesepakatan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kasunanan Surakarta Hadiningrat berpusat di Kartasura dan diperintah Sunan Paku Buwono III. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berpusat di Yogyakarta diperintah oleh Pangeran Mangkubumi. Adapun Raden Mas

Said akhirnya diakui sebagai Pangeran yang berkuasa di Mangkunegaran dengan gelar Pengeran Aryo Adipati Mangkunegoro.

4. Pangeran Mangkubumi membangun ibukota kerajaan di Hutan Beringin, suatu kawasan di antara Sungai Winongo dan Sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Pada tanggal 7 Oktober 1756 resmi berdiri Kota Yogyakarta sebagai ibukota Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan rajanya Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I.
5. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari Presiden Republik Indonesia (RI). Selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan di DIY akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.
6. Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kasultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah DIY.
7. Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonom dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1947, dimana pasal 1 menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.
8. Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir. Moh. Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih

merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dimana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu tahun 1955.

9. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.
10. Atas dasar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Provinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah Tingkat II.
11. Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur urusan wajib dan pilihan dalam menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Sesuai dengan undang-undang ini, maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta

diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Walikota sebagai Kepala Daerahnya.

1.1.2. Perkembangan Perencanaan dan Penataan Kota Yogyakarta

1. Pembentukan Kota Yogyakarta dimulai dari keberadaan kraton yang dipakai sebagai pusat pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sejak tanggal 7 Oktober 1756. Pada saat itu, pusat kota dibangun oleh Pangeran Mangkubumi, tidak hanya dengan kemampuan teknis teknologi, tetapi juga berlandaskan pada sikap olah batin dan olah jiwa dalam kaitan hubungan makhluk dengan penciptanya. Pusat kota yang mengambil area di bekas Hutan Beringin, berada di antara dua buah sungai, sudah memperhitungkan aspek rasional dan irrasional. Pengamanan, kesejahteraan umat, ketenangan batin dan memenuhi filosofi pandangan hidup masyarakat Jawa, merupakan hasil olah pikir yang mendasari bagaimana pusat kota diciptakan. Hal yang penting dicatat sebagai komponen tata ruang kota adalah adanya "poros imajiner" yang secara filosofis mengandung makna tentang hubungan mikrokosmos-makrokosmos yang diwujudkan pada garis as jejalar jalan panggung Krapyak – Kraton – Tugu Palputih yang dikaitkan dengan garis hubungan irrasional Laut Selatan – Kraton – Gunung Merapi. Garis as inilah yang menjadi kerangka utama tata ruang pusat kota, membentuk jejaring jalur jalan, yang dewasa ini dikenal dengan 'jalur H', yang berintikan pada posisi kraton. Garis as inilah yang kemudian menjadi kerangka "poros kota" yang selanjutnya menjadi pusat pertemuan jejaring jalur jalan yang memancar dari pusat kota ke arah wilayah pinggiran dan sekitarnya membentuk satu kesatuan struktur tata ruang kota, sesuai tingkat perkembangannya.
2. Filosofi pembentukan pusat kota yang ditumpukan pada keberadaan kraton menampilkan jati diri kota yang secara spesifik memancarkan citra Kota Yogyakarta. Filosofi ini menjadi dasar atau pondasi yang kuat berlandaskan pada sistem religi, sistem kebudayaan dan sistem sosial serta interaksi antara ketiganya dalam tata lingkungan kehidupan pada jamannya. Arti kraton dan tata fisik jabarannya dalam struktur tata ruang kota, merupakan transformasi konsep dasar sistem religi yang mengejawantahkan hidup manusia di alam fana ini. *Manunggaling Kawulo Lan Gusti* dan *Sangkan Paraning Dumadi* menjadi latar belakang olah religi

dan olah budaya kota, yang dapat berjalan dan terpancar sepanjang masa dari waktu ke waktu, selalu menjadi inspirasi/konsep pemikiran perencanaan dan penataan Kota Yogyakarta yang berintikan pada kota lama, lingkungan kraton dan sekitarnya. Susunan tata wilayah dan strata sosialnya pada keadaan awal Kota Yogyakarta juga difokuskan pada penjabaran budaya di atas yang secara keseluruhan membentuk wilayah tatanan kemasyarakatan dalam wilayah tata ruang fisik kota dan berkembang kemudian ke arah luar menjadi keadaan kota seperti sekarang ini.

3. Peletakan unit-unit kegiatan kota di daerah pusat kota pada dasarnya memanfaatkan pola berlapis-lapis (*delineasi konsentris*) sebagai konsep *kosmogoni* kota. Inti konsep kosmogoni berkait pada cita-cita bahwa keselamatan, ketentraman dan kemakmuran dapat dicapai apabila tercipta keselarasan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah perwujudan dari "*Jagading Manungsa*" bisa merupakan kerajaan atau negara ataupun kota, sedangkan makrokosmos dijabarkan sebagai dunia atas (*supra-natural*). Makrokosmos dikelilingi secara berlapis-lapis oleh mikrokosmos menciptakan tatanan keselarasan. Upaya menciptakan tatanan perwujudan keselarasan ini, dilakukan dengan membentuk tatanan *negaragung* (pusat kota), *kutanagara* (bagian badan kota) dan *mancanagara* (luar kota) diterapkan dalam bentuk fisik dan non fisik. Bentuk fisik transformasinya bisa dilihat pada pembagian tata bangunan dan tata ruang kota. Bentuk non fisik dapat diamati jabarannya pada tata kemasyarakatan dan tata pemerintahan.
4. Sebagai upaya pengamanan kraton, selain dititikberatkan secara fisik pada keberadaannya diantara dua sungai, juga didukung secara non fisik oleh tata kaitan penjagaan *paju papat limo pancer* dalam sistem pertahanan keamanan waktu itu. Dibentuk pesanggrahan-pesanggrahan dengan para petugas jaga di empat sudut kota dalam menegakkan hubungan antara kerajaan dengan masyarakat pendukungnya, menggunakan sistem pertahanan keamanan lingkungan dan kota tertentu. Komponen kelimanya berada pada titik pusat kendali kraton yang menjadi *pancering angger-angger* dan pelaksanaan pengendalian tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan maupun budaya. Dari sistem tata kendali ini dapat dilihat jabarannya pada sistem tata ruang kota, ada komponen fisik dan non fisik sebagai isi kegiatan kehidupan kota dan masyarakatnya. Situasi dan kondisi seperti itu berjalan dalam kurun waktu, mengalami persebaran dan

pergeseran tertentu, terutama dalam tata fisiknya. Namun mekanisme kegiatan kehidupan kota lebih lanjut, masih nampak berlanjut dan berkesinambungan, tentu saja dengan bentuk dan corak mengikuti perkembangan teknologi dan jamannya.

5. Inti kota lama yang dimulai dengan tatanan ruang *catur gatra tunggal* yaitu adanya unsur kraton, masjid, pasar, fasilitas rekreasi yang berada di sekitar alun-alun membentuk satu kesatuan tata ruang pusat kota, kemudian disambung ke arah luar secara berlapis-lapis mewujudkan pelayanan kepada masyarakat oleh pusat kerajaan, yang dilambangkan dengan "*dharmaning ratu*". Secara alami berkembang fungsi-fungsi pelayanan di sekitar "*poros utama kota*" antara Alun-alun Utara dan Tugu Pal Putih di bagian utara kota. Fungsi-fungsi pelayanan sebagai perwujudan "*dharmaning ratu*" dimulai dari kegiatan kraton waktu itu sebagai pusat budaya, kemudian disusul dengan pola dan bentuk perkembangannya. Perkembangan fungsi-fungsi pelayanan kehidupan kota dari waktu ke waktu, terjadi dominasi fungsi pada kehidupan kota saat ini.
6. Kemudian dikenal adanya predikat kota, yang secara alami dibentuk oleh perilaku perkembangan tata pelayanan kehidupan kota, yang antara lain dicerminkan dalam tata guna lahan. Predikat Kota Yogyakarta yang terbentuk atas berkembangnya fungsi-fungsi pelayanan kota yang dominan tadi, dapat diurutkan sebagai berikut :

- kota budaya
- kota perjuangan
- kota pendidikan, dan
- kota pariwisata

Secara urut memang demikian, berdasarkan perjalanan sejarah kehidupan dan fungsi kota yang nyata terjadi. Sebagai kota yang berpredikat hendaknya selalu dapat memenuhi kriteria pembentukan "predikat kota" sebagai berikut :

- realita dominasi fungsi pada tatanan kehidupan kota
- didukung oleh tatanan kehidupan masyarakat kota
- dicerminkan olah tata pemanfaatan lahan dan bangunan, dan
- diciptakan kehidupan riil secara fisik dan non fisik pada tata ruang kota.

Apabila perwujudan fisik dan non fisik dari predikat kota tersebut pada kondisi nyata Kota Yogyakarta saat ini, perlu dibenahi kembali agar kriteria predikat tersebut benar-benar dapat ditegakkan.

7. Keadaan tata ruang kota yang pada awalnya terbentuk pada pusat kraton dengan poros utama antara Alun-alun Utara sampai dengan Tugu Pal Putih, dilanjutkan dengan komunitas-komunitas sosial secara berlapis-lapis ke arah pinggiran kota, membentuk "inti kota lama". Perkembangannya kemudian dengan tumbuhnya pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat transportasi, pusat rekreasi, pusat produksi jasa, pusat-pusat permukiman di arah perkembangan baru, membentuk tata ruang kota dengan beberapa pusat kegiatan.
8. Jejaring jalan berkembang memencar ke arah luar dari jalur H yang ada di pusat, dengan jejalur kisi-kisi terbentang ke arah utara-selatan dan ke arah barat-timur saling bersilangan melintasi sistem jejalur sungai yang ada, membentuk satu kesatuan struktur tata ruang kota tertentu. Struktur tata ruang kota ini berkembang dari waktu ke waktu, namun tetap berintikan pada jalur H dan poros utama kota lama. Jejaring struktur tata ruang kota yang akan datang dalam sistem hirarki pelayanan jalan yang pas, dalam rangka menciptakan jati diri tata ruang kota. Jati diri tata ruang kota ini memang sudah dibentuk sebagai perwadahan jati diri olah pikir, olah budaya maupun sistem kehidupan kota yang berkembang di atasnya.
9. Sebagai upaya pemanfaatan lebih lanjut dari modal dasar pembentukan kota dan unsur-unsur yang mendasarinya seperti disebutkan di muka adalah komitmen masyarakat dan pengelola kota untuk tetap membina dan membangun kota dengan latar belakang sejarah dan budaya kota terkait. Hal ini dapat diakumulasikan dalam upaya pelestarian agar tetap memiliki jati diri kota.
10. Warisan-warisan olah pikir, olah religi, olah budaya dan olah tata fisik kota sebagaimana diungkapkan di muka, hendaknya dapat diteruskembangkan menjadi pola dasar perencanaan kota masa kini dan masa datang. Sudah barang tentu harus ada penyesuaian tertentu dari hal berkembang dan berubah dengan tuntutan perkembangan teknologi dan jamannya. Sebagai misal konsep *Manunggaling Kawulo Lan Gusti*, *Sangkan Paraning Dumadi*, *Dharmaning Ratu* dan *Paju Papat Limo Pancer*, yang semula diperuntukkan pembentukan kota lama yang berintikan kraton, akan sangat memerlukan jабaran baru pada tata ruang pinggiran kota dan area sekitarnya sebagai perluasan dan perkembangan fisik kota saat ini. Hal ini nantinya tentu akan menjadikan satu kesatuan struktur tata ruang perkembangan kota saat ini, yang tetap bersumberkan pada latar belakang sejarah dan budaya yang melandasinya. Upaya pelestarian kota melihat

bagian mana yang dilestarikan, dan bagian mana yang dapat mengakomodasikan perkembangan baru, sehingga kehidupan dan wujud kota tidak berhenti. Kota berkembang sesuai dengan jamannya, namun tetap memiliki muatan nuansa jiwa warisan sejarah dan budayanya.

1.1.3. Pengertian RPJPD Kota Yogyakarta

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005–2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta untuk periode 20 tahun yang memuat kondisi umum, visi, misi dan arah pembangunan Kota Yogyakarta.

1.1.4. Proses Penyusunan RPJPD Kota Yogyakarta

Dalam upaya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005–2025 yang dapat mengantisipasi arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, dilaksanakan tahapan sebagai berikut.

Pertama, penyiapan rancangan RPJPD, kegiatan ini dibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah. *Kedua*, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap rancangan RPJPD. *Ketiga*, penyusunan rancangan akhir RPJPD, seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD. *Keempat*, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses penyusunan RPJPD maka dalam proses penyusunannya dilakukan tahapan konsultasi publik yang melibatkan semua pihak yang terkait. *Kelima*, penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kota Yogyakarta sebagai dokumen perencanaan pembangunan kota untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Yogyakarta (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, toleran, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan idiil dari RPJPD Kota Yogyakarta ini adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kota Yogyakarta.

1.4. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kota dalam jangka panjang, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kota Yogyakarta dan berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan kota di segala bidang.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Rencana Induk Kota Yogyakarta tahun 1985 – 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1986. Rencana Induk Kota tersebut diikuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 yang merupakan perencanaan ruang kota dari tahun 1990-2010. Pemanfaatan ruang kota terbagi menjadi 5 (lima) bagian wilayah kota dan disertai dengan adanya rencana infrastruktur kota. Pada tahun 1992 Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan slogan "Yogyakarta Berhati Nyaman" dengan Perda Nomor 1 Tahun 1992 yang merupakan dasar tata nilai kehidupan lahir maupun batin masyarakat Yogyakarta dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersumber pada nilai-nilai budaya daerah "Ngayogyakarta

Hadiningrat" sebagai bagian dari budaya nasional yang bersumber pada falsafah Pancasila. Slogan Yogyakarta Berhati Nyaman dijiwai semangat "Mangayu Hayuning Bawana" sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta.

3. Rencana Umum Tata Ruang Kota (Perda Nomor 6 Tahun 1994) ditetapkan dalam rangka perencanaan ruang kota dari tahun 1994-2004, diantaranya berisi (i) pemanfaatan dan pengendalian ruang kota dengan potensi yang terdapat di dalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna; (ii) terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya; (iii) adanya penetapan kawasan lindung; (iv) tertatanya perkembangan kawasan budidaya yang meliputi kawasan permukiman dan pusat pelayanan kegiatan; (v) penetapan kawasan prioritas pengembangan; (vi) penetapan sistem pelayanan perkotaan dan tertatanya jaringan induk sistem prasarana perkotaan; (vii) penetapan kebijakan yang berkaitan dengan tata guna tanah, tata guna air dan sumber daya alam (SDA); serta (viii) kebijakan penunjang penataan ruang.
4. Dokumen Perencanaan lainnya yang disusun pada tahun 2002 yaitu Pola Dasar, Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategik Daerah yang masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002. Pola Dasar memuat Visi Kota Yogyakarta, yaitu "Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana"
5. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJPD) untuk 20 tahun ke depan yang diarahkan untuk ikut mencapai tujuan nasional. Dokumen tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.5. SISTEMATIKA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 memberikan gambaran mengenai wujud masa

depan yang diinginkan dan diperjuangkan serta diupayakan pencapaiannya, mencakup aspek pembangunan dari segala bidang kehidupan baik sebagai daerah otonom maupun sebagai bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RPJPD Kota Yogyakarta disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Kota Yogyakarta

Bab III Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005–2025

Bab IV Penutup

BAB II

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA YOGYAKARTA

2.1. KONDISI DAN ANALISIS

2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

A. Masukan

Permasalahan

1. Permasalahan geomorfologi yang dialami Kota Yogyakarta berasal dari dua faktor, yaitu faktor alamiah (*endowment*) dan sumber daya manusia. Faktor alamiah adalah faktor yang tidak sepenuhnya mampu dikendalikan, antara lain letak geografis Kota Yogyakarta di antara Gunung Merapi dan Samudera Indonesia. Geomorfologi Kota Yogyakarta tersebut memberikan keuntungan daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan masalah terkait dengan risiko terjadinya bencana alam gempa bumi vulkanik maupun tektonik.
2. Bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di Provinsi DIY dan sekitarnya termasuk Kota Yogyakarta, telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 223 orang, luka-luka 318 orang, serta pengungsi sebanyak 80.368 orang. Dari sisi bangunan rumah yang rusak berat sebanyak 6.095, rusak sedang 8.408, rusak ringan 15.364 dan kerusakan infrastruktur lainnya seperti bangunan sarana pendidikan, kesehatan, bangunan tempat ibadah, bangunan cagar budaya, gedung pemerintah, jalan dan jembatan, serta fasilitas sosial lainnya. Dari sisi non fisik berdampak negatif pada aspek psikologis/trauma anak-anak, aspek ekonomi, aspek sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya.
3. Kota Yogyakarta dilewati oleh tiga sungai, yaitu Sungai Code, Winongo, dan Gajah Wong, yang apabila musim hujan berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor di daerah aliran sungai. Permasalahan banjir dan tanah longsor di daerah aliran sungai tidak sepenuhnya dapat dikendalikan Pemerintah Kota Yogyakarta, karena hulu sungai dan daerah penyangga berada di luar kewenangan Kota Yogyakarta.
4. Sementara itu, permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh faktor manusia adalah terkait dengan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan aspek kelestarian dan kebersihan lingkungan, antara lain kurangnya disiplin masyarakat dan dunia usaha dalam membuang

sampah, limbah industri, pendirian rumah hunian di bantaran sungai dan pendirian bangunan liar yang kurang mentaati peraturan perundang-undangan.

5. Peningkatan kepadatan lalu lintas di Yogyakarta akibat dari banyaknya kendaraan bermotor telah menimbulkan masalah meningkatnya angka polusi udara di Kota Yogyakarta. Banyak kendaraan bermotor dari daerah lain yang beroperasi di Kota Yogyakarta. Masalah penurunan kualitas udara sehat dan bersih di Kota Yogyakarta juga diperparah dengan berkurangnya pepohonan kota sebagai akibat beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Selain itu berkurangnya daerah penyangga yang berada di luar kewenangan Kota Yogyakarta akibat pengalihan lahan untuk perumahan juga memberikan kontribusi menurunkan kualitas udara Kota.
6. Kualitas air yang semakin menurun lebih diakibatkan pencemaran dari buangan limbah rumah tangga maupun limbah industri yang tidak mengindahkan aturan pembuangan dan pengolahan limbah yang benar terhadap kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga berdampak pada kondisi air sumur penduduk, air sungai maupun air tanah. Sementara sumber air dari hulu, kondisi airnya seringkali bercampur lumpur akibat gerusan tanah karena erosi dan penggundulan vegetasi di perbukitan dan hutan. Secara kuantitas distribusi air minum melalui sistem jaringan air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Dalam *Millennium Development Goals* direncanakan adanya peningkatan akses air minum dalam Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) dan non perpipaan. Cakupan pelayanan air minum di Kota Yogyakarta yang menggunakan SPAM baru mencapai ± 60 persen sedang sisanya dilayani dari non perpipaan (Non SPAM) yang terlindungi.

Capaian Keberhasilan

1. Terwujudnya taman kota pada tahun 2005 seluas 58.760 m² yang mampu membantu memperindah wajah kota, menyediakan ruang publik untuk aktivitas sosial dan rekreasi warga serta memperbaiki kualitas udara.
2. Tersosialisasikannya dengan baik promosi "Jogjaku Bersih" yang berdampak pada meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.

3. Dilakukannya perbaikan dan peningkatan kapasitas bangunan air dalam rangka mengatasi banjir dan tanah longsor di daerah aliran sungai.
4. Dibiidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapat beberapa penghargaan yaitu Penyelenggaraan Uji Emisi Kendaraan Dinas pada tahun 2004, *Cities For Climate Protection Campaign* pada tahun 2004 dan Adipura Bangun Praja Tingkat Nasional pada tahun 2005, sedangkan di Bidang Pekerjaan Umum mendapat penghargaan Pembinaan Kawasan Kumuh Perkotaan dan Sanitasi pada tahun 2005.

B. Analisis

Proyeksi Peluang

1. Kota Yogyakarta secara geomorfologis dikelilingi oleh gunung, bukit, lautan, hutan dan lahan pertanian. Meskipun hal tersebut berada di luar wilayah kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi Kota Yogyakarta memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi strategis tersebut untuk pengembangan kota.
2. Kota Yogyakarta dibelah tiga sungai yaitu Sungai Code, Winongo dan Gajah Wong dengan kemiringan tanah menuju ke selatan sudah memakai sistem drainase yang tertata, sehingga air hujan cepat mengalir dan tidak mengakibatkan terjadinya genangan.
3. Dalam waktu 20 tahun yang akan datang, Kota Yogyakarta memiliki peluang untuk menjadi kota bersih dan indah.

Proyeksi Ancaman

1. Kota Yogyakarta yang berada di lereng Gunung Merapi yang masih aktif, serta posisi wilayah yang berada di dekat garis patahan bumi sekarang ini menghadapi kondisi rawan bencana alam. Apabila aktivitas vulkanologi Gunung Merapi semakin meningkat dan terjadinya gempa bumi akibat pergeseran patahan bumi, dalam periode 20 tahun ke depan bukan tidak mungkin Kota Yogyakarta akan mendapatkan pengaruh langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pembangunan kota ke depan harus mengantisipasi adanya kemungkinan bencana dan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas vulkanologi Gunung Merapi maupun pergeseran patahan bumi.
2. Bencana longsor dan banjir mengancam kehidupan masyarakat di sekitar bantaran sungai. Sempitnya wilayah dan tingginya kebutuhan ruang hidup akibat semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk khususnya

penduduk urban, berpotensi adanya pemukiman liar di lahan yang seharusnya bukan untuk tempat tinggal. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa beberapa bantaran sungai telah dipadati rumah-rumah atau permukiman penduduk, padahal bencana banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan mereka.

3. Kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan alam, polusi, penurunan daya dukung alam dan isu pemanasan global.

Proyeksi Permasalahan

1. Kondisi lingkungan hidup dan pengelolaan SDA masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan kecenderungannya terus menurun dan ketersediaan SDA semakin menipis.
2. Pencemaran air, udara dan tanah di Kota Yogyakarta juga masih belum tertangani secara tepat, karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan serta pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta. Untuk itu, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan SDA secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat kota untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan pelestarian lingkungan dalam 20 tahun mendatang agar Kota Yogyakarta tidak mengalami krisis lingkungan hidup dan SDA, khususnya krisis air, krisis pangan dan krisis energi.
3. Dalam pelestarian lingkungan hidup, masih lemahnya sistem pemantauan dan pengendalian atas pencemaran udara dan air serta terbatasnya ruang terbuka hijau kota.

Proyeksi Keberhasilan

1. Meningkatnya tingkat kenyamanan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks kualitas hidup masyarakat Yogyakarta.
2. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan Kota Yogyakarta memproyeksikan untuk menjadikan diri sebagai kota bersih, indah dan nyaman. Hal tersebut ditandai dengan rendahnya tingkat pencemaran lingkungan air, tanah dan udara di bawah ambang batas yang ditetapkan, sebagai perwujudan semboyan "Yogyakarta Berhati Nyaman".

3. Terwujudnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
4. Tersedianya fasilitas kota yang ramah lingkungan dan sistem pengelolaan lingkungan yang maju dan modern.

C. Keluaran

Prediksi kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup

1. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan banyaknya orang yang beraktivitas di Kota Yogyakarta baik yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta maupun yang datang dari luar Kota Yogyakarta akan semakin meningkat. Hal itu menimbulkan konsekuensi meningkatnya kepadatan lalu lintas, polusi udara, penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.
2. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan akan terjadi pergeseran tata ruang kota yang berpengaruh pada ekosistem dan kehidupan organisme. Akibat semakin menyempitnya ruang kota, maka beberapa habitat binatang akan terganggu, dan sebagian spesies akan berkurang.
3. Tumbuh-tumbuhan hasil dari transgenik akan meningkat, rekayasa genetik pada tumbuhan dan hewan semakin luas dilakukan. Hal ini disamping memberikan manfaat juga dapat menimbulkan residu berupa pencemaran yang berefek negatif bagi manusia.
4. Dalam waktu 20 tahun ke depan, kerusakan lapisan ozon akan semakin meluas. Hal itu akan memicu terjadinya pemanasan global yang berpotensi pada pergantian musim yang tidak teratur, perubahan cuaca dan perubahan lingkungan.
5. Pengelolaan sumber daya alam dan daya dukungnya diarahkan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, generasi sekarang dan selanjutnya.
6. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
7. Pelaksanaan pembangunan yang ramah lingkungan.

2.1.2. Demografi

A. Masukan

Permasalahan

1. Peningkatan angka harapan hidup dan rendahnya angka kelahiran telah menciptakan perubahan struktur demografi. Konsekuensi dari perubahan struktur kependudukan tersebut adalah meningkatnya jumlah penduduk berusia tua.
2. Permasalahan demografi yang dialami selama ini adalah terkait dengan kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Kepadatan penduduk pada tahun 1996 tercatat sebesar 14.599 jiwa per km persegi, meningkat menjadi 15.314 jiwa per km persegi pada tahun 2000. Meski pada tahun 2005 terjadi penurunan kepadatan penduduk yakni menjadi 12.897 jiwa per km persegi, di masa mendatang masih perlu diwaspadai karena pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun selama periode 1996 hingga 2005 rata-rata masih relatif tinggi yakni di atas 1 persen per tahun.
3. Tingkat urbanisasi dan migrasi ke Kota Yogyakarta relatif tinggi dan di masa mendatang masih dimungkinkan terjadi peningkatan karena daya tarik Kota Yogyakarta bagi pendatang baru untuk tinggal dan beraktivitas di Kota Yogyakarta masih tetap tinggi.
4. Angka pengangguran memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya untuk tahun 1996 angka pengangguran sebesar 14.977 orang atau sebesar 3,1 persen dari total penduduk, pada tahun 2000 menjadi 16.011 orang atau sebesar 3,21 persen dari total penduduk, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 31.664 orang atau sebesar 6,1 persen dari total penduduk. Angka tersebut cukup tinggi untuk ukuran Kota Yogyakarta.
5. Angka kemiskinan masih cukup tinggi, apabila dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga, jumlah keluarga pra sejahtera menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 1996, jumlah keluarga pra sejahtera tercatat sebanyak 981 atau 1,33 persen dari total keluarga, mengalami peningkatan pada tahun 2000 dan 2005 masing-masing sebanyak 3.142 (4,19 persen) dan 5.456 (6,30 persen). Sedangkan apabila ditinjau dari jumlah KK/orang pada tahun 1996 angka kemiskinan sebesar 20.398 KK / 81.592 orang atau sebesar 17,19 persen dari total penduduk, pada tahun 2000 menjadi 27.819 KK / 111.276 orang atau sebesar 22,43 persen dari total penduduk, sedangkan tahun 2005 sebesar 67.226 orang atau 12 persen dari total penduduk.

6. Angka kematian ibu melahirkan masih relatif tinggi. Pada tahun 1996 kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup tercatat sebanyak 59,05 jiwa, mengalami kenaikan menjadi 66,79 jiwa pada tahun 2000 dan meningkat lagi sebanyak 78,25 jiwa pada tahun 2005.

Capaian Keberhasilan

1. Berhasilnya menekan angka kematian bayi pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan Provinsi DIY maupun Nasional. Pada tahun 1996 tercatat angka kematian bayi sebesar 5,9 bayi per 1000 kelahiran, naik menjadi 7,68 pada tahun 2000, tetapi dapat ditekan lagi menjadi 3,56 pada tahun 2005.
2. Terbentuknya sistem pelayanan sosial yang mampu menjamin semua kelompok usia untuk mendapatkan pelayanan sosial sehingga kebutuhan dasarnya terpenuhi.
3. Laju urbanisasi yang bisa dikendalikan sehingga berbagai permasalahan sosial di perkotaan seperti perkampungan kumuh (*slum*) bisa ditekan.
4. Terciptanya suatu kondisi pasar tenaga kerja yang mampu menampung laju peningkatan angkatan kerja sehingga permasalahan pengangguran bisa dikurangi.
5. Di bidang kependudukan Pemerintah Kota mendapat penghargaan Manggala Karya Kencana pada tahun 2003, sedangkan di Bidang Kesehatan mendapatkan beberapa penghargaan yaitu Manggala Karya Bhakti Husada pada tahun 2004 dan Swasti Saba Wiwerda di bidang Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2005.
6. Usia harapan hidup rata-rata penduduk relatif tinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Untuk jenis kelamin laki-laki, rata-rata usia harapan hidup pada tahun 1996 tercatat 70,92 tahun, meningkat menjadi 72,25 tahun pada tahun 2000, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 66,38 tahun. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan, angka harapan hidup lebih panjang kurang lebih empat tahun dibanding laki-laki. Pada tahun 1996, usia harapan hidup rata-rata perempuan adalah 74,89, sedangkan untuk tahun 2000 dan 2005 masing-masing 76,64 dan 70,25 tahun.
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai tingkat yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Pada tahun 1999 skor IPM mencapai 73,4 yang menduduki ranking 2 di Indonesia dan pada tahun

2002 naik menjadi 75,3 dan menduduki ranking 3. Sedangkan pada tahun 2005 skor IPM meningkat menjadi 77,4.

B. Analisis

Proyeksi Peluang

1. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki peluang untuk meningkatkan usia harapan hidup penduduk di atas 75 tahun.
2. Pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta secara bertahap berkurang, tetapi angkanya masih relatif tinggi. Hal tersebut terlihat dari angka kepadatan penduduk yang diperkirakan akan mencapai sebesar 17.907 orang per Km² pada tahun 2025. Upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk terus dilakukan sehingga laju pertumbuhan penduduk telah dapat diturunkan dari waktu ke waktu. Kota Yogyakarta berpeluang untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk sebesar nol persen (*zero growth*), dan bahkan pertumbuhan menurun (*decreasing growth*) dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 20 tahun yang akan datang dapat mengarahkan komposisi demografi yang ideal, sehingga terjadi keseimbangan dan harmonisasi antara penduduk usia produktif dengan nonproduktif.

Proyeksi Ancaman

1. Penanganan terhadap penduduk yang mengalami permasalahan sosial telah menunjukkan peningkatan. Hal tersebut sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Namun, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan ancaman terhadap permasalahan penduduk akan semakin meningkat dan kompleks. Ancaman di bidang kependudukan tersebut secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi aspek lain dalam pembangunan Kota Yogyakarta.
2. Masalah kemiskinan di Kota Yogyakarta masih akan menjadi ancaman yang perlu ditangani secara cermat dan serius. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 adalah sebanyak 67.226 orang atau mengalami penurunan sebesar 4,87 persen dari tahun 2004 yang mencapai 70.667 orang. Meskipun jumlah penduduk miskin sudah dapat ditekan, tetapi

masalah kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun mendatang. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, masalah kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Dengan terjadinya gempa bumi tanggal 27 Mei 2006, maka jumlah penduduk miskin diprediksi mengalami kenaikan kurang lebih 5 persen.

3. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Kota Yogyakarta menghadapi masalah rendahnya kualitas hidup masyarakat yang terkait dengan gaya/perilaku hidup tidak sehat. Derajat kesehatan tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja, tetapi merupakan gabungan dari berbagai indikator yang berkaitan satu sama lain. Kualitas hidup suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Proyeksi Permasalahan

1. Masalah yang akan dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 20 tahun ke depan terkait dengan demografi adalah terjadinya struktur penduduk yang semakin menua. Hal ini disebabkan usia harapan hidup semakin tinggi, sementara pertumbuhan penduduk rendah.
2. Perilaku kesehatan yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan belum menunjukkan hasil yang optimal. Sebagai contoh masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan, belum optimalnya budaya bersih yang salah satu indikatornya adalah angka bebas jentik masih berkisar antara 35-70 persen, dimana seharusnya angka bebas jentik lebih dari 95 persen.
3. Belum membudayanya pengetahuan remaja dan perempuan tentang kesehatan reproduksi berpotensi menyebabkan semakin meningkatnya penderita penyakit kanker rahim dan kanker payudara serta penyakit reproduksi lainnya.
4. Masih adanya gizi buruk pada balita, sehingga apabila tidak diantisipasi sejak dini akan mengakibatkan semakin tingginya gizi buruk pada balita dan menurunnya kualitas hidup generasi mendatang.
5. Semakin banyaknya lansia yang menderita penyakit degeneratif dikarenakan pola hidup yang tidak sehat sejak awal.

Proyeksi Keberhasilan

Keberhasilan bidang demografi yang hendak dicapai Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

1. Tercapainya usia harapan hidup rata-rata laki-laki dan perempuan di atas 75 tahun. Berdasarkan perkembangan data harapan hidup tahun 1996 hingga 2005, perempuan mempunyai harapan hidup yang lebih panjang sekitar 4 tahun dibanding laki-laki.
2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk kurang dari satu persen per tahun.
3. Menurunnya angka kematian bayi menjadi 1,5 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu melahirkan 73 per 100.000 kelahiran hidup.
4. Terkendalinya tingkat urbanisasi di Kota Yogyakarta.

C. Keluaran

Prediksi kondisi demografi Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

1. Struktur penduduk yang semakin menua. Hal ini terlihat dari semakin kecilnya jumlah kelahiran dan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.
2. Kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta akan meningkat karena pertumbuhan penduduk yang masih di atas nol persen per tahun dan masih adanya arus urbanisasi.
3. Komposisi penduduk Kota Yogyakarta akan semakin heterogen karena dampak globalisasi menyebabkan terjadinya arus migrasi antar daerah dan negara.

2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

A. Masukan

Permasalahan

1. Menjelang krisis ekonomi pada tahun 1997, pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta sebelum krisis sesungguhnya sedang berada pada tahap optimisme yang tinggi sehubungan dengan keberhasilan pencapaian pertumbuhan perekonomian kota yang cukup tinggi. Pada tahun 1997, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,75 persen. Namun berbagai upaya perwujudan sasaran pembangunan praktis terhambat akibat krisis yang berpengaruh terhadap perekonomian Kota Yogyakarta tersebut dimana pertumbuhan ekonomi tahun 1998 merosot menjadi negatif 11,29 persen.

Akibat krisis, perusahaan yang tutup pada tahun 1998 sebanyak 3 buah dan perusahaan yang mem-PHK dikarenakan krisis moneter sebanyak 26 perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang ter-PHK karena perusahaannya tutup dan karena dampak dari krisis moneter adalah sebanyak 1.076 orang. Pertumbuhan cukup tinggi yang berhasil dipertahankan cukup lama pada saat sebelum krisis, secara umum lebih banyak didorong oleh peningkatan akumulasi modal dan tenaga kerja daripada peningkatan produktivitas perekonomian Kota Yogyakarta secara berkelanjutan. Dari krisis tersebut teridentifikasi kelemahan mendasar bahwa kemajuan selama ini belum diikuti oleh peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi. Oleh karena itu, di samping rentan terhadap gangguan eksternal, struktur perekonomian kota akan sulit berkembang ketika dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat, baik pada pemasaran hasil-hasil produksi maupun pada peningkatan investasi dalam era perdagangan bebas dan perekonomian dunia yang semakin terbuka.

2. Tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Pada tahun 1998 persentase penduduk yang menganggur dan termasuk dalam kategori angkatan kerja tercatat sebanyak 5,72 persen. Akibat krisis, jumlah pengangguran pada tahun 1999 meningkat menjadi 17,26 persen. Meski demikian, seiring dengan proses membaiknya perekonomian pasca krisis, jumlah pengangguran dapat ditekan menjadi 8,49 pada tahun 2000. Tingkat pengangguran kembali mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, tercatat pada tahun 2003 mencapai 12,10 persen dari angkatan kerja. Sampai pada tahun 2005 tingkat pengangguran masih relatif tinggi yaitu mencapai angka 13,55 persen dari angkatan kerja.
3. Laju inflasi masih relatif tinggi dan berfluktuasi sebagai dampak dari kebijakan ekonomi makro nasional yang masih belum mantap. Pada tahun 1996 yakni setahun sebelum krisis terjadi, laju inflasi masih relatif rendah yakni 3,05 persen per tahun. Pada saat krisis terjadi pada tahun 1997, laju inflasi meningkat menjadi 12,72 persen dan membumbung tinggi hingga 77,46 persen setahun berikutnya. Pada tahun 2003 dan 2004, laju inflasi mampu ditekan hingga 1 digit masing-masing 5,73 persen dan 6,95 persen per tahun. Namun, akibat kebijakan penyesuaian harga-harga komoditi yang diatur pemerintah terutama BBM menyebabkan inflasi pada tahun 2005 kembali meningkat hingga 14,98 persen. Hal ini akan memperlemah daya beli masyarakat terutama lapisan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

4. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta. Pada tahun 2006 tercatat kurang lebih ada 8 ribu unit usaha yang tergolong UMKM baik yang memiliki ijin usaha maupun tidak. Daya serap tenaga kerja di sektor ini relatif besar dan merupakan basis penghasilan utama dari sebagian masyarakat kota. UMKM juga menyerap tenaga kerja perempuan yang relatif besar terutama yang bergerak di sektor-sektor usaha jasa perdagangan, kerajinan dan jasa boga. Meski demikian, masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, di antaranya adalah rendahnya akses permodalan, kesinambungan pasokan bahan baku, lemahnya posisi tawar sehingga menekan harga jual, kualitas produk rendah, rendahnya akses informasi pasar dan rendahnya daya saing terhadap produk-produk manufaktur. Sehubungan dengan terjadinya gempa bumi pada bulan Mei 2006, maka kemampuan UMKM mengalami penurunan, terutama di lima kecamatan terparah akibat gempa bumi. Diperkirakan antara satu sampai dua tahun setelah terjadinya gempa aktivitas ekonomi UMKM mulai tumbuh kembali.
5. Kota Yogyakarta dapat dikategorikan daerah yang tidak kaya akan sumber daya alam, sehingga kegiatan usaha produksi yang berbasis sumber daya alam kurang berkembang.
6. Fasilitas perdagangan, dalam hal ini pasar, sebagian besar masih belum memenuhi kualitas yang diharapkan. Di Kota Yogyakarta pada tahun 2005 terdapat 33 pasar yang menempati lahan seluas 108.121,77 m² dengan 13.242 pedagang. Dari keseluruhan pasar yang ada, sekitar 30 persen pasar sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan 70 persennya merupakan pasar tradisional dengan sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas. Adapun jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2005 tercatat sejumlah 5.003 pedagang.
7. Dalam kurun waktu tahun 1998-2002 kegiatan kepariwisataan Kota Yogyakarta mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya krisis ekonomi dan isu terorisme yang mempengaruhi menurunnya minat wisatawan domestik maupun asing untuk berkunjung ke Yogyakarta.

Capaian Keberhasilan

1. Adanya berbagai upaya penanganan krisis dan didukung oleh penerapan otonomi daerah yang lebih luas yang dimulai pada 1 Januari tahun 2001 yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya

sendiri berdampak pada membaiknya kondisi perekonomian Kota Yogyakarta. Perbaikan kondisi tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu nilai pertumbuhan ekonomi telah meningkat dari 1,03 persen pada tahun 1999 menjadi sebesar 4,49 persen pada tahun 2002, dan meningkat lagi menjadi 5,83 persen pada tahun 2005. PDRB per kapita juga mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2000, tercatat sebesar Rp 8.832.294 per kapita, pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar Rp 10.182.152 dan menjadi Rp 10.470.649 pada tahun 2005.

2. Iklim investasi yang relatif kondusif didukung oleh stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Yogyakarta. Kondisi keamanan dan ketertiban yang relatif terkendali dan tidak banyaknya timbul gejolak dan konflik di Kota Yogyakarta. Di samping itu, perbaikan kondisi ekonomi ditunjukkan pula dengan membaiknya iklim usaha baik industri kecil, industri kecil hasil pertanian dan kehutanan, industri logam, mesin dan kimia (LMK) serta industri aneka. Pertumbuhan nilai investasi dari industri tersebut masing-masing pada tahun 2004 adalah 1,57 persen, 3,42 persen, 0,63 persen dan 0,89 persen.
3. Pada tahun 2005 jumlah industri kecil di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 5.854 unit, dengan jumlah tenaga kerja 30.589 orang dan nilai investasi sebesar Rp 152.434.004.500,-. Banyaknya industri kecil hasil pertanian dan kehutanan pada tahun 2005 adalah 2.348 unit mengalami kenaikan sebesar 0,86 persen jika dibandingkan tahun 2004. Jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 11.876 orang, mengalami kenaikan sebesar 1,43 persen dengan nilai investasi sebesar Rp 45.464.467.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 3,42 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 43.961.001.000,-.
4. Jumlah industri besar dan sedang yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2005 adalah 129 unit, terdiri dari 19 unit industri besar dan 110 unit industri sedang. Industri besar dan sedang yang dominan diantaranya adalah industri logam, mesin dan kimia. Nilai investasi industri logam, mesin dan kimia di Kota Yogyakarta pada tahun 2005 sebesar Rp 29.541.980.000,- mengalami kenaikan sebesar 0,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah unit usaha yang ada sebanyak 1.387 unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 6.646 orang. Sedangkan banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh industri aneka pada tahun 2005 adalah 11.885 orang, dengan jumlah industri sebanyak 2.108 unit dan nilai investasi sebesar Rp 75.837.749.000,-.

5. Meskipun sejak krisis ekonomi telah terjadi penurunan kegiatan kepariwisataan, namun terjadi kenaikan dan penurunan yang relatif cukup bervariasi pada jumlah wisatawan. Kota Yogyakarta masih tetap menjadi pilihan utama baik bagi pelajar maupun keluarga untuk menghabiskan masa liburannya. Pada tahun 1996 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Yogyakarta sebanyak 210.561 orang dan wisatawan asing sebanyak 738.024. Pada tahun 2000 jumlah wisnus meningkat menjadi 1.507.582, tetapi jumlah wisman menurun menjadi 151.132. Sementara pada tahun 2005 tercatat hanya sebanyak 595.539 wisnus dan jumlah wisatawan asing sebanyak 363.105 orang.
6. Perkembangan fasilitas kepariwisataan yang ada di Kota Yogyakarta juga mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas yang cukup signifikan. Hotel/penginapan merupakan salah satu prasarana yang mendukung perkembangan pariwisata. Pada tahun 1996 jumlah hotel/penginapan di Kota Yogyakarta sebanyak 294 hotel terdiri dari 16 hotel bintang dan 278 hotel non bintang. Pada tahun 2000 jumlah hotel/penginapan di Kota Yogyakarta sebanyak 321 hotel terdiri dari 19 hotel bintang dan 302 hotel non bintang. Pada tahun 2005 jumlah hotel/penginapan di Kota Yogyakarta sebanyak 329 hotel terdiri dari 23 hotel bintang dan 306 hotel non bintang. Adapun tingkat hunian kamar hotel tahun 2005 secara keseluruhan mencapai 43,13 persen yang mengalami peningkatan sebesar 6,68 persen dibandingkan tahun 2004.
7. Industri kepariwisataan Kota Yogyakarta yang mengandalkan potensi seni dan budaya serta fasilitas, sarana dan prasarana telah menghasilkan dampak berganda (*multiplier effect*) yang sangat besar di masyarakat. Industri ini telah menggairahkan kehidupan perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta, baik yang sifatnya industri rumah tangga (*home industry*) maupun perusahaan jasa dan barang. Bidang kepariwisataan juga telah menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar bagi Kota Yogyakarta.

B. Analisis

Proyeksi Peluang

1. Perkembangan kota yang pesat dan munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Yogyakarta.

2. Potensi pariwisata yang unggul dapat menarik para wisatawan baik domestik maupun mancanegara sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan Kota Yogyakarta.
3. Potensi lokasi Kota Yogyakarta sebagai salah satu titik pusat segala kegiatan di kawasan sekitarnya. Kota Yogyakarta sebagai ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan Kota Yogyakarta mempunyai posisi yang sangat strategis berkaitan dengan aspek lokasi.
4. Diberlakukannya pasar bebas ASEAN (AFTA) bisa memberikan peluang bagi perekonomian daerah untuk bersaing di pasar regional dan global sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Proyeksi Ancaman

1. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembangunan kota dalam jangka panjang pada dasarnya menyangkut masalah pertumbuhan ekonomi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana sistem perekonomian dapat mewujudkan keserasian antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas Kota Yogyakarta dan tersedianya dana untuk investasi sehingga dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan penduduk jika perekonomian dapat tumbuh dinamis. Pembangunan ekonomi dalam jangka menengah perlu dilakukan upaya-upaya stabilisasi dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dalam hal pengangguran dan mengendalikan perkembangan harga-harga secara umum.
2. Munculnya kebijakan pemerintah pusat yang berdampak kurang menguntungkan pada kondisi perekonomian daerah misalnya kebijakan kenaikan BBM, kenaikan suku bunga, instabilitas politik, penurunan nilai tukar dan sebagainya.
3. Globalisasi dan pasar bebas di samping menjadi peluang juga bisa menjadi ancaman apabila daerah tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Jika produk-produk lokal tidak efisien dan berkualitas, maka akan kalah bersaing dengan produk asing, sehingga akan merugikan ekonomi daerah.

Proyeksi Permasalahan

1. Sektor ekonomi masih didominasi oleh sektor informal sehingga masih menghadapi berbagai kendala teknis.
2. Persaingan akan semakin tajam, sementara daya saing produk lokal masih belum kuat.

3. Sumber daya alam akan semakin berkurang. Hal ini akan menyebabkan krisis SDA, khususnya krisis air dan pangan pada perekonomian daerah.

Proyeksi Keberhasilan

1. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Kota Yogyakarta memproyeksikan perbaikan kondisi perokonomian daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4 – 7 persen per tahun secara berkesinambungan dan laju inflasi berada pada kisaran 4 – 9 persen per tahun.
2. Membaiknya iklim usaha baik industri kecil menengah dan besar. Hal ini ditandai dengan terjadinya mobilisasi vertikal usaha yang harmonis antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
3. Meningkatnya nilai investasi di daerah yang ditandai dengan peningkatan kapasitas produksi.
4. Terbangunnya struktur perekonomian kota yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
5. Terbangunnya sistem, kelembagaan dan infrastruktur perekonomian yang maju dan unggul.
6. Terwujudnya prinsip demokrasi ekonomi di Kota Yogyakarta yang menjamin adanya keadilan ekonomi masyarakat sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja.
7. Terwujudnya UMKM sebagai pelaku ekonomi utama daerah yang berbasis teknologi, berdaya saing tinggi dan berkualitas.
8. Terbangunnya jaringan kerjasama wisata yang mantap dan berkelanjutan dengan berbagai pihak dan daerah lain; terbangunnya sarana dan prasarana wisata yang memadai; meningkatnya kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat kota dalam pengembangan pariwisata; promosi dan pemasaran wisata yang efektif ke seluruh dunia. Meningkatnya daya tarik objek wisata, khususnya dalam menampilkan *landmark (tetenger/ciri monumental)* dan budaya khas Kota Yogyakarta.
9. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata terkemuka.

C. Keluaran

1. Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha, meningkatnya investasi, kesempatan kerja dan kesejahteraan pekerja.

2. Terwujudnya Kota Yogyakarta yang tidak hanya sebagai kota pariwisata dan pendidikan tetapi juga diharapkan sebagai kota tujuan belanja yang spesifik.
3. Terciptanya pembangunan yang selaras antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas kota dan pertumbuhan ekonomi.
4. Terlaksananya pembangunan yang bersinergi dengan kabupaten lain dalam hal memutuskan kebijakan tertentu seperti pembangunan fasilitas umum, transportasi dan sebagainya.
5. Pembangunan kapasitas ekonomi daerah yang kembali berbasis pada ekonomi kerakyatan, ditandai dengan keberpihakan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah.

2.1.4. Sosial Budaya dan Politik

A. Masukan

Permasalahan

1. Degradasi nilai-nilai moral, sosial dan budaya terus terjadi di masyarakat. Semakin mudarnya budaya Jawa yang memiliki nilai adiluhung terutama di kalangan generasi muda merupakan masalah yang merisaukan sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini tampak dari semakin rendahnya penguasaan dan berkurangnya penggunaan Bahasa Jawa oleh generasi muda terutama untuk komunikasi formal serta menurunnya tata krama dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Masuknya budaya asing akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, terutama budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai budaya daerah dan nilai religius, tidak sepenuhnya dapat dicegah dan dikendalikan. Derasnya arus informasi dan hiburan berkarakter budaya asing selain menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, juga dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa mudarnya nilai-nilai religius dan norma-norma sosial serta mendorong berkembangnya penyakit masyarakat.
3. Apresiasi masyarakat yang kurang dan cenderung menurun terhadap produk-produk budaya tradisional tertentu, seperti wayang kulit dan ketoprak, disebabkan oleh kecenderungan masyarakat memilih budaya modern yang lebih populer dan serba materialistik.
4. Meningkatnya kecenderungan sikap acuh atau apatis dari sebagian kelompok masyarakat dalam menciptakan tata kehidupan bermasyarakat

yang bersih, sehat, tertib dan aman menunjukkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan Kota Yogyakarta yang Berhati Nyaman masih belum optimal. Disamping itu ikatan sosial di masyarakat semakin merenggang, masyarakat semakin bersikap permisif terhadap pelanggaran nilai budaya, moral dan agama.

5. Kesadaran masyarakat kota yang mengedepankan koridor hukum dalam setiap gerak kehidupan serta budaya patuh dan taat hukum masih belum optimal termasuk dalam hal penegakan peraturan perundangan. Meski angka kriminalitas dan pelanggaran hukum di Kota Yogyakarta relatif rendah, bukan berarti tidak ada kasus-kasus kriminal yang berpengaruh negatif terhadap pembangunan daerah. Perkembangannya saat ini menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan.
6. Penurunan moral, meningkatnya kriminalitas, semakin tidak diamalkannya norma-norma religius, perubahan budaya yang cenderung negatif, berkembangnya budaya kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dan semakin tingginya persaingan yang cenderung menjadi tidak sehat dalam jangka panjang merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi sejak dini. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius adalah berkaitan dengan penyalahgunaan napza.
7. Pembangunan kehidupan beragama masyarakat belum sepenuhnya berhasil dengan baik. Ajaran-ajaran agama khususnya mengenai etos kerja, disiplin, penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Demikian pula pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
8. Kentalnya budaya paternalistik sehingga masih terjadi bias gender terkait dengan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol di berbagai bidang kehidupan.
9. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik dan proses pengambilan keputusan publik masih minim.

Capaian Keberhasilan

1. Keberhasilan penting yang telah diraih adalah telah dilaksanakannya pemilu langsung anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota, serta pemilihan presiden dan wakil presiden dengan aman dan demokratis pada tahun 2004. Hal ini merupakan modal awal yang penting

bagi lebih berkembangnya demokrasi dengan akan diselenggarakannya pemilihan Kepala Daerah/Walikota Yogyakarta secara langsung pada tahun 2006.

2. Di Kota Yogyakarta terdapat 24 partai politik. Total jumlah pemilih pada pemilu legislatif tahun 2004 adalah sebanyak 318.826 orang, dengan jumlah TPS sebanyak 1.144 orang yang terdiri dari 1.122 buah TPS dan 22 buah TPS khusus. Pada pemilu Pilpres Tahap I Jumlah pemilih adalah sebanyak 317.148 orang, dengan jumlah TPS sebanyak 1.144 buah terdiri dari 1.125 TPS dan 19 buah TPS khusus, sedangkan pada pemilu Pilpres II jumlah pemilih sebanyak 314.728 orang dengan jumlah TPS 1.144 buah.
3. Secara umum kehidupan keagamaan masyarakat Kota Yogyakarta sudah sangat kondusif. Secara kuantitas, jumlah tempat peribadahan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan hari-hari besar agama dapat berjalan baik. Secara kualitas, kehidupan keagamaan telah mencerminkan perkembangan yang semakin baik. Tingkat religiusitas masyarakat kota tetap terjaga, kerukunan antar umat beragama juga relatif baik yang tercermin dari rendahnya intensitas maupun frekuensi kejadian konflik yang berlatar belakang agama. Pada tahun 2005 Kota Yogyakarta mendapat predikat sebagai *City of Tolerance*.
4. Perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban Kota Yogyakarta relatif baik dan terjaga. Kondisi tersebut menciptakan iklim yang kondusif dalam mendukung pembangunan kota ke depan. Dengan tingkat pendidikan yang relatif baik, kehidupan beragama yang cukup religius, toleransi dan kerukunan yang relatif tinggi, semangat persaudaraan dan kekeluargaan yang masih terjaga, budaya dan falsafah hidup Jawa yang masih cukup kental, tekanan ekonomi dan tingkat persaingan hidup yang relatif belum ketat menjadikan masyarakat Kota Yogyakarta relatif dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan dan potensi konflik yang berkembang di masyarakat.
5. Tingkat kejahatan di Kota Yogyakarta relatif rendah. Pada tahun 2005 jenis pelanggaran/tindak kejahatan yang terjadi sebanyak 515 kasus terdiri dari pelanggaran terhadap mata uang sebanyak 3 kasus, memalsu meterai/surat 3 kasus, kesusilaan 2 kasus, perjudian 15 kasus, penculikan 2 kasus, pembunuhan 3 kasus, penganiayaan 53 kasus, pencurian 62 kasus, perampokan 31 kasus, memeras/mengancam 6 kasus, penggelapan 47 kasus, penipuan 95 kasus, merusak barang 9 kasus, narkoba 51 kasus, narkoba 92 kasus dan lain-lain sebanyak 41 kasus.

Penipuan merupakan jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi yaitu sebesar 18,45 persen, di posisi kedua dan ketiga secara berturut-turut yaitu narkoba (17,86 persen) dan pencurian (12,04 persen). Adapun jenis pelanggaran yang paling jarang terjadi adalah kesusilaan dan penculikan masing-masing hanya sebesar 0,39 persen.

B. Analisis

Proyeksi Peluang

1. Kota Yogyakarta yang mempunyai banyak predikat antara lain sebagai Kota Pendidikan, Kota Perjuangan, Kota Budaya dan predikat lainnya sebenarnya dapat dikembangkan lebih lanjut dan dapat dijadikan peluang untuk dimanfaatkan dalam proses pembangunan ke depan.
2. Kota Yogyakarta dengan dukungan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat berpeluang untuk menjadi pusat peradaban nasional dan dunia. Budaya Jawa memiliki peluang untuk disejajarkan dengan peradaban besar di dunia.
3. Kota Yogyakarta berpeluang untuk menjadi model *City of Tolerance* bagi kota-kota lain di Indonesia maupun luar negeri.

Proyeksi Ancaman

1. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan terdapat ancaman berupa perubahan perilaku yang semakin permisif dan perubahan budaya yang semakin meninggalkan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Keramahan khas Yogyakarta, kesederhanaan, dimensi kerakyatan, konsep "*manunggaling kawulo gusti*" yang merepresentasikan harmonisasi hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan jika tidak diantisipasi dengan baik akan mengalami degradasi.
2. Identitas kebanggaan yang melekat terhadap Kota Yogyakarta dapat semakin berkurang dan bahkan mungkin akan hilang.
3. Masuknya arus globalisasi yang membawa arus informasi, modal, tenaga kerja bisa mengancam eksistensi budaya lokal.
4. Ketidakstabilan politik nasional yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang dapat mengancam stabilitas politik di daerah.

Proyeksi Permasalahan

1. Kapasitas Kota Yogyakarta dalam jangka panjang juga menjadi isu yang relatif penting untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sampai pada

suatu titik tertentu di masa mendatang, kapasitas kota akan berada pada posisi *full utilization*. Oleh karena itu, permasalahan pengembangan kapasitas daerah perlu diantisipasi dan mendapatkan perhatian yang cukup. Pengembangan kapasitas daerah terkait dengan banyak hal, antara lain kapasitas fiskal dan keuangan daerah, kapasitas ekonomi daerah, kapasitas kehidupan politik dan demokrasi, kapasitas masyarakat, kapasitas kelembagaan dan aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta termasuk juga berbagai aturan yuridis formal, kapasitas daya sarana dan prasarana serta fasilitas umum, kapasitas SDM, kapasitas daya dukung lingkungan hidup, kapasitas pelayanan umum.

2. Semakin heterogennya komposisi penduduk mengakibatkan rendahnya dukungan dan semangat masyarakat untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan tradisi serta budaya lokal, sehingga kearifan lokal cenderung terkikis.
3. Masalah degradasi dan dekadensi moral di kalangan masyarakat masih akan menjadi masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta.

Proyeksi Keberhasilan

Proyeksi keberhasilan bidang sosial, budaya dan politik yang hendak dicapai dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

1. Terwujudnya kultur masyarakat madani di Kota Yogyakarta, yaitu masyarakat kota yang mengedepankan penegakan dan penghormatan hukum legal dalam setiap aspek kehidupannya, menjunjung tinggi nilai moral, etika dan toleransi dalam aspek kehidupan bermasyarakat.
2. Terwujudnya stabilitas politik dan kehidupan demokrasi di Kota Yogyakarta yang didukung dengan ketatapemerintahan yang baik.
3. Terciptanya budaya politik masyarakat yang baik yang dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang ditandai oleh: (a) terwujudnya kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media; (b) terwujudnya berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.
4. Terwujudnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam mendeteksi, melindungi dan melakukan tindakan pencegahan berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Terpeliharanya budaya Jawa yang luhur yang dimiliki Kota Yogyakarta.
6. Terbentuknya budaya inovatif yang berorientasi iptek dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya lokal.

C. Keluaran

Prediksi kondisi sosial, budaya dan politik Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

1. Terjadi pergeseran nilai-nilai sosial kemasyarakatan di Kota Yogyakarta seiring dengan arus modernisasi dan globalisasi.
2. Akan terjadi revitalisasi dan modernisasi kebudayaan Jawa.
3. Terwujudnya kultur masyarakat madani di Kota Yogyakarta, yaitu masyarakat kota yang mengedepankan penegakan dan penghormatan hukum legal dalam setiap aspek kehidupannya, menjunjung tinggi nilai moral, etika dan toleransi dalam aspek kehidupan bermasyarakat.
4. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di Kota Yogyakarta, infrastruktur dan jaringan kerjasama wisata akan semakin maju dan berkelanjutan dengan berbagai pihak dan daerah lain.
5. Terjadi orientasi pariwisata di masyarakat, pariwisata minat khusus akan menjadi pilihan wisata yang semakin dicari.
6. Stabilitas politik Kota Yogyakarta sedikit banyak akan dipengaruhi oleh keberadaan, kewibawaan dan peran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
7. Demokratisasi politik lokal akan terus berkembang di Kota Yogyakarta.
8. Permasalahan sosial akan semakin kompleks, meliputi masalah prostitusi, aborsi, kriminalitas, anak jalanan, napza dan penyakit masyarakat lainnya.

2.1.5. Sarana dan Prasarana

A. Masukan

Permasalahan

1. Kota Yogyakarta sebagai pusat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Provinsi DIY dan sekitarnya telah mengalami proses aglomerasi yang semakin membebani daya dukung infrastruktur, sosial dan lingkungan hidup perkotaan. Beberapa kawasan penting di pusat kota seperti kawasan Malioboro dan Jalan Solo sudah mencapai tingkat kepadatan aktivitas yang tinggi. Pada sisi lain, koordinasi antar kabupaten/kota dan dengan Provinsi DIY perlu ditingkatkan lagi secara lebih mendetail dalam menangani permasalahan aglomerasi perkotaan.

2. Kepadatan aktivitas sosial ekonomi di wilayah Kota Yogyakarta semakin tinggi. Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 32,5 km² atau meliputi 1,02 persen dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kota tersebut relatif sempit dan saat ini hampir tidak mungkin lagi untuk dilakukan pengembangan wilayah kecuali dengan mendapatkan wilayah tambahan yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Sleman maupun Kabupaten Bantul.
3. Tingkat urbanisasi dan migrasi sebagai akibat kesenjangan pola ekonomi perkotaan dan perdesaan cenderung meningkat. Hal ini menimbulkan permasalahan *free-rider* yang terkait dengan pemanfaatan fasilitas publik yang disediakan Pemerintah Kota oleh penduduk luar Kota Yogyakarta. Sebagai dampaknya adalah Pemerintah Kota Yogyakarta menanggung beban sendirian, sedangkan kabupaten-kabupatennya merasa tidak mempunyai kewajiban untuk berbagi beban.
4. Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Yogyakarta baik untuk permukiman, perdagangan dan industri menyebabkan terjadinya penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dengan rata-rata 8 persen per tahun.
5. Perdagangan dan jasa baik tingkat primer maupun sekunder mendominasi hampir semua penggal jalan dimana hal ini akan mengurangi kenyamanan pengguna jalan dan mengganggu kelancaran lalulintas.
6. Penggunaan lahan di Kota Yogyakarta pada tahun 2005, dominasi penggunaan lahan adalah lahan bukan sawah, yaitu seluas 3.250 Ha (sebesar 96,25 persen), sedangkan untuk lahan sawah hanya seluas 123 Ha (3,75 persen). Kecamatan yang masih mempunyai lahan sawah adalah Kecamatan Mantrijeron (4 hektar/3,28 persen), Mergangsan (5 hektar/4,10 persen), Umbulharjo (61 hektar/50 persen), Kotagede (26 hektar/21,31 persen) dan Tegalrejo (26 hektar/21,31 persen).
7. Kualitas prasarana jalan di Kota Yogyakarta untuk jalan negara kondisinya sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi jalan yang baik sebesar 80,58 persen dan sedang sebesar 19,42 persen. Untuk kondisi jalan provinsi dan kabupaten/kota kondisinya masih belum baik. Kondisi jalan provinsi sedang sebesar 74,69 persen dan yang rusak sebesar 25,31 persen, sedangkan untuk jalan kabupaten kondisi jalan yang baik sebesar 20,60 persen, kondisi jalan sedang sebesar 45,07 persen dan kondisi jalan rusak sebesar 34,33 persen

8. Fasilitas transportasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal. Jumlah sarana angkutan umum dan pribadi yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 adalah 260.496 unit mengalami pertumbuhan sebesar 8,36 persen dengan proporsi terbesar sepeda motor yaitu sebanyak 213.690 unit dengan proporsi 82,03 persen. Kualitas layanan transportasi publik dapat dikatakan masih jauh dari memuaskan. Armada bus kota sebagai sarana transportasi umum perlu dilakukan peremajaan dan dilakukan peningkatan standar teknis agar dapat dijadikan sebagai alternatif angkutan pribadi yang kian memadati jalan-jalan di Kota Yogyakarta.

Capaian Keberhasilan

1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan ruang publik sebagai tempat aktivitas bermain dan rekreasi yang rapi, indah dan terpelihara, sehingga mampu menciptakan kawasan yang semakin sejuk dan asri bagi warga Kota Yogyakarta.
2. Akses terhadap air bersih di Kota Yogyakarta relatif cukup baik. Produksi air minum pada tahun 2005 mencapai 18.430.031 m³. Volume air yang disalurkan hanya 15.586.861 m³ atau 84,57 persen dari total produksi. Jumlah pelanggan pada tahun 2005 tercatat 34.582 pelanggan yang terdiri dari Rumah Tangga 31.318, Pemerintah 1.080, Sosial 714, Niaga 1.447, Industri 12 dan Kebudayaan 11.
3. Rasio elektrifikasi bagi rumah tangga relatif baik. Mayoritas rumah tangga sudah menggunakan sumber penerangan PLN yaitu sebanyak 130.001 rumah tangga (97,07 persen) dan sisanya menggunakan sumber penerangan non PLN sebanyak 1,19 persen dan petromak sebanyak 0,15 persen. Jumlah pelanggan listrik PLN di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 148.339 pelanggan. Mayoritas pelanggan adalah rumah tangga yaitu sebesar 88,79 persen dengan jumlah pemakaian 233.297.114 KWh atau 48,04 persen dari total pemakaian.

B. Analisis

Proyeksi Peluang

1. Sebagai pusat aglomerasi perkotaan, Kota Yogyakarta mempunyai kebutuhan infrastruktur di bidang perdagangan dan jasa karena Kota Yogyakarta merupakan pusat aktifitas sosial ekonomi masyarakat di Provinsi DIY.

2. Dengan terbatasnya lahan di wilayah Kota Yogyakarta maka peluang untuk pengembangan bangunan vertikal menjadi salah satu alternatif sehingga koneksitas antara tidak terlalu jauh.
3. Banyaknya pengguna kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi sebagai alat transportasi dengan proporsi mencapai 94,75 persen pada tahun 2005, maka perlu penyediaan sarana transportasi masal yang nyaman dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk difabel, lansia serta ibu hamil.

Proyeksi Ancaman

1. Banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal dalam jangka panjang menimbulkan dampak terjadinya permukiman yang padat, jika hal ini tidak ditata dengan baik maka mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan sosial, pelanggaran hukum dan permukiman kumuh.
2. Semakin banyaknya pengguna kendaraan sedangkan di sisi lain panjang jalan di Kota Yogyakarta relatif tetap, jika sistem dan manajemen transportasi tidak ditata dengan baik maka akan mengakibatkan kemacetan/kesemrawutan lalu lintas.
3. Jika kontinuitas pelayanan air bersih dari PDAM Tirta Marta dan kondisi lingkungan tidak terjaga dengan baik, maka masyarakat akan cenderung menggunakan air tanah yang bisa mengancam kesehatan karena mengandung bakteri coli.
4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah saat ini berada di wilayah Kabupaten lain, apabila terjadi masalah dengan TPA sampah tersebut akan mengakibatkan penumpukan sampah yang selanjutnya menurunkan derajat kesehatan kota.

Proyeksi Permasalahan

1. Sulitnya penataan kawasan kumuh berdampak munculnya berbagai permasalahan sosial.
2. Kurang layaknya sarana transportasi massal sehingga menyebabkan tingginya penggunaan sepeda motor dan mobil pribadi, hal ini menimbulkan potensi kemacetan dan polusi udara.
3. Terbatasnya dana dan lemahnya koordinasi menimbulkan permasalahan tata ruang perkotaan.

Proyeksi Keberhasilan

1. Jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antar moda berbasis pada efisiensi, efektif dan berkeadilan.
2. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan bagi rumah tangga dan dunia usaha.
3. Tersedianya sarana dan prasarana publik yang handal di sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan dan energi.
4. Semakin meratanya tingkat aksesibilitas sarana dan prasarana publik berdasarkan asas keadilan
5. Tercukupinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

C. Keluaran

Prediksi kondisi sarana dan prasarana Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

1. Pembangunan perumahan di daerah perkotaan akan mengarah pada model bangunan vertikal karena keterbatasan lahan.
2. Kebutuhan akan sarana transportasi massal yang aman dan nyaman semakin tinggi. Hal itu menuntut perlunya perbaikan sarana dan prasarana di bidang transportasi publik, seperti jalan, moda dan sistem lalu lintas.
3. Transportasi akan menjadi faktor pendukung yang sangat vital sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, pengembangan sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota di masa yang akan datang.
4. Semakin tinggi tuntutan pembangunan perkotaan yang dilaksanakan secara berencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan permukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja serta kegiatan ekonomi dan sosial agar terwujud lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta menjaga keserasian dan keselarasan nilai sosial budaya yang mencerminkan kepribadian daerah.
5. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka di masa yang akan datang kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi semakin tinggi. Jaringan infrastruktur nirkabel (*wireless*) di Kota Yogyakarta akan menjadi kebutuhan penting.

6. Di masa datang, permasalahan terhadap pengelolaan persampahan kota semakin kompleks. Kebutuhan terhadap instalasi pengolahan sampah dan limbah yang modern dan efisien menjadi sangat vital. Misalnya pengadaan sistem jaringan *riool* kota yang terpusat ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

2.1.6. Pemerintahan

A. Masukan

Permasalahan

1. Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta masih perlu ditingkatkan. Beberapa kekurangan yang masih menghambat kinerja dan efisiensi kerja aparat adalah terkait dengan beberapa faktor, antara lain (i) belum optimalnya koordinasi inter dan antar instansi sehingga masih dijumpai duplikasi dan hambatan dalam implementasi kebijakan, serta (ii) belum optimalnya perubahan pola pikir dan kultur birokrasi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik.
2. Pelayanan umum kepada masyarakat di semua fungsi pemerintahan belum didukung oleh jumlah personel yang cukup dengan kualifikasi pendidikan yang relatif memadai. Pada sisi lain, kompetensi tinggi dituntut dalam rangka menyikapi perkembangan pembangunan yang pesat dalam 20 tahun mendatang perlu diantisipasi sejak sekarang. Standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang memuaskan, kompetensi tinggi dan profesionalisme aparatur pemerintah menjadi salah satu faktor penting pembangunan kota di masa mendatang menuju terwujudnya *good governance*.
3. Pelayanan umum saat ini masih belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta struktur kelembagaan yang belum efektif dalam menjalankan pelayanan umum dan pelaksanaan pemerintahan di Kota Yogyakarta.
4. Respon Pemerintah Kota dalam mengapresiasi perkembangan kebutuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sebagai langkah awal yang baik, saat ini sudah mulai dikembangkan kebijakan pelayanan umum dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pelayanan umum dengan konsep *community charter based* tampaknya ke depan akan menjadi sebuah keharusan karena masyarakat madani dengan tingkat perkembangan kemajuan yang sudah sangat tinggi di semua aspek kehidupannya akan

menuntut aplikasi demokrasi partisipatif yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2005 tercatat sebanyak 8.225 orang. Menurut tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil lulusan S2 sebanyak 135 orang, lulusan S1 sebanyak 3.054 orang, D3/Akademi sebanyak 1.659 orang, SMA/SMK sebesar 2.695 orang, lulusan SLTP sebanyak 389 orang dan SD sebanyak 293 orang. Proporsi terbesar adalah PNS lulusan S1 sebesar 37,13 persen, kedua adalah PNS lulusan SMA/SMK sebesar 32,77 persen, ketiga adalah PNS lulusan D3/Akademi sebesar 20,17 persen. Sedangkan proporsi yang terkecil adalah PNS lulusan S2 hanya sebesar 1,64 persen.

Capaian Keberhasilan

1. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan.
2. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

B. Analisis

Proyeksi Peluang

1. Insentif pajak dan kemudahan administrasi perijinan yang terus dikembangkan Pemerintah Kota Yogyakarta akan menjadikan Kota Yogyakarta mempunyai peluang yang semakin baik di masa mendatang. Iklim investasi akan terus berkembang dinamis. Potensi dan peluang usaha yang ada di Kota Yogyakarta selanjutnya akan direspon positif oleh pelaku bisnis dengan investasi bisnis yang menguntungkan.
2. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan Kota Yogyakarta lebih cepat tumbuh dan berkembang. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi sudah terlihat nyata dalam praktek pembangunan di berbagai kota di belahan dunia. Teknologi saat ini menjadi salah satu masukan penting dalam proses pembangunan.

Proyeksi Ancaman

1. Kesiapan SDM pemerintah dalam menghadapi era globalisasi, teknologi, dan informasi.

2. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pembangunan, maka kebijakan pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengikuti perkembangan zaman.

Proyeksi Permasalahan

1. Penataan kelembagaan pemerintah Kota Yogyakarta yang belum dapat secara optimal menjalankan kewenangan, urusan dan fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
2. Profesionalisme, kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur birokrasi pemerintah Kota Yogyakarta yang belum dioptimalkan.
3. Pelayanan administrasi umum pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam menegakkan dan menciptakan *good governance*. Sebagai salah satu fungsi pokok yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, maka fungsi ini perlu diperhatikan lebih mendalam berkaitan dengan masih banyaknya berbagai permasalahan terkait dengan pelayanan administrasi umum.

Proyeksi Keberhasilan

1. Tegaknya supremasi hukum dan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Aparatur pemerintah yang profesional untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa dan bertanggung jawab serta mempunyai kompetensi tinggi.
3. Terwujudnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan dan berwibawa serta bebas dari praktek-praktek KKN.

C. Keluaran

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah Kota Yogyakarta, pelayanan administrasi kepegawaian, budaya disiplin dan etos kerja, kualitas kebijakan kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan pegawai yang lebih baik.
2. Terwujudnya pengembangan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui tersedianya sarana dan prasarana pengawasan sesuai perkembangan teknologi.
3. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pajak daerah.
4. Pengembangan potensi daerah secara maksimal yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat;
6. Peningkatan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui wakil rakyat dengan mekanisme yang sah, konstitusional dan berbudaya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan warga masyarakat;
8. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, dinamis dan bertanggung jawab;
9. Menempatkan masyarakat, lembaga sosial masyarakat dan swasta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah;
10. Meningkatkan pelayanan perijinan sehingga terwujud pelayanan prima.

2.1.7. Pendidikan

A. Masukan

Permasalahan

1. Belum terpenuhinya kompetensi SDM pendidik secara optimal terutama dalam mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
2. Di Kota Yogyakarta daya tampung untuk semua jenjang pendidikan secara normatif sudah terpenuhi. Namun kecukupan daya tampung ini belum ditunjang oleh kualitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sebagian sekolah belum dapat dioptimalkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 tahun hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan mutu, di samping peningkatan aksesibilitas kesempatan bersekolah. Secara kualitatif dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan di Kota Yogyakarta secara makro sudah baik, satu hal yang harus diperhatikan adalah persebaran kualitas yang belum merata.
3. Biaya penyelenggaraan pendidikan yang relatif tinggi menjadi beban bagi sebagian masyarakat.
4. Adanya berbagai pengaruh negatif terhadap dunia pendidikan dapat merusak citra pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Lemahnya sistem dan mekanisme pendidikan non formal yang mampu menjamin pemberian akses yang cukup bagi masyarakat, sehingga menyebabkan masih dijumpainya angka buta huruf dan putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar.

6. Masih adanya pola pikir yang berdampak pada bias gender dalam partisipasi, akses, pemerataan dan manajemen pendidikan.

Capaian Keberhasilan

1. Pada tahun ajaran 2005/2006 di Kota Yogyakarta terdapat 206 Taman Kanak-kanak (TK) terdiri dari 2 TK negeri dan 204 TK swasta, dengan jumlah murid 310 orang di TK negeri dan 11.084 orang di TK swasta. Jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 208 buah, terdiri dari 127 SD Negeri dan 81 SD Swasta. Jumlah kelas yang ada adalah 1.705 kelas (999 di SD Negeri dan 706 di SD Swasta), sedangkan jumlah guru SD adalah 2.720 orang (1.575 guru di SD Negeri dan 1.145 guru di SD Swasta). Total jumlah murid SD adalah 44.912 orang yang terdiri dari 23.782 orang di SD Negeri dan 21.130 orang di SD Swasta. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) hanya ada 2 yang terdiri dari 1 MI negeri dan 1 MI swasta dengan 218 siswa.
2. Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Yogyakarta adalah 59 buah terdiri dari 16 SMP Negeri dan 43 SMP Swasta. Jumlah kelas yang ada sebanyak 627 kelas (280 kelas di SMP negeri dan 347 kelas di SMP swasta). Total jumlah guru 1.808 orang terdiri dari 797 orang guru di SMP negeri dan 1.011 orang di SMP swasta. Jumlah murid SMP adalah 22.676 orang, yaitu 11.210 orang di SMP negeri dan 11.466 orang di SMP swasta. Sementara itu Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Yogyakarta pada tahun 2005/2006 adalah 7 buah, dengan jumlah kelas 51 kelas (15 kelas di MTs negeri dan 36 kelas di MTs swasta). Jumlah guru MTs sebanyak 207 orang terdiri dari 43 orang di MTs negeri dan 164 orang di MTs swasta. Adapun jumlah murid yang ada adalah 1.848 orang, 552 orang di MTs negeri dan 1.296 orang di MTs swasta.
3. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Yogyakarta adalah 49 buah (11 SMA negeri dan 38 SMA swasta), dengan jumlah kelas dan guru berturut-turut 626 kelas (209 kelas di SMA negeri dan 417 kelas di SMA swasta) serta 1.829 orang guru (593 orang guru di SMA negeri dan 1.236 orang guru di SMA swasta). Sedangkan total jumlah murid SMA adalah 21.021 orang, terdiri dari 7.874 orang di SMA negeri dan 12.147 orang di SMA swasta. Jumlah Madrasah Aliyah (MA) di Kota Yogyakarta pada tahun ajaran 2005/2006 terdapat 6 sekolah Madrasah Aliyah (2 Madrasah Aliyah negeri dan 4 Madrasah Aliyah swasta) dengan jumlah kelas 65 buah (36 kelas di Madrasah Aliyah negeri dan 29 kelas di Madrasah Aliyah

swasta). Jumlah Guru yang ada adalah 270 orang (115 orang guru di Madrasah Aliyah negeri dan 155 orang guru di Madrasah Aliyah swasta) serta jumlah murid 2.227 orang (1.281 orang di Madrasah Aliyah negeri dan 946 orang di Madrasah Aliyah swasta). Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah 30 buah SMK (7 SMK negeri dan 23 SMK swasta) dengan jumlah kelas 457 buah (253 kelas di SMK negeri dan 204 kelas di SMK swasta). Total jumlah guru SMK adalah 1.520 orang (796 orang guru di SMK negeri dan 724 orang guru di SMK swasta) serta dengan jumlah murid sebanyak 14.017 orang (8.343 orang di SMK Negeri dan 5.674 orang di SMK Swasta).

4. Saat ini jumlah perguruan tinggi di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 50 buah yang semuanya merupakan perguruan tinggi swasta. Untuk melayani keseluruhan perguruan tinggi yang terdiri dari 8 universitas, 10 institut/sekolah tinggi dan 32 akademi dengan 76.071 orang mahasiswa ini, digunakan sebanyak 4.980 orang dosen. Sebagian besar mahasiswa berasal dari luar Kota Yogyakarta. Hal ini merupakan bukti bahwa kualitas pendidikan tinggi di Kota Yogyakarta masih memiliki daya saing dan daya tarik yang tinggi.

B. Analisis

Proyeksi Peluang

1. Kota Yogyakarta yang mempunyai predikat sebagai Kota Pendidikan, Kota Perjuangan, Kota Budaya dan Kota Pariwisata dapat dikembangkan lebih lanjut dan dapat dijadikan peluang untuk dimanfaatkan dalam proses pembangunan ke depan.
2. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) unggul karena adanya berbagai lembaga pendidikan yang berkualitas di Yogyakarta.
3. Adanya daya tarik pendidikan di Yogyakarta dapat menarik bibit unggul daerah untuk dapat berkiprah di Yogyakarta dan dapat berkontribusi bagi pembangunan Kota Yogyakarta.
4. Adanya daya tarik pendidikan di Yogyakarta dapat menciptakan banyak peluang bisnis yang cukup besar yang dapat diciptakan.
5. Adanya peluang menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang responsif gender.

Proyeksi Ancaman

1. Semakin kompetitif persaingan dalam dunia pendidikan pada level nasional ataupun internasional.
2. Faktor-faktor negatif yang saat ini merusak pembangunan pendidikan di Kota Yogyakarta perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Misalnya pengaruh budaya luar yang bersifat negatif seperti narkoba, minuman keras dan pornografi sebagai salah satu dampak globalisasi.

Proyeksi Permasalahan

1. Sumber daya manusia untuk masa mendatang akan menjadi isu utama. Kapasitas dan kompetensi SDM di sebuah komunitas akan menjadi salah satu faktor penting menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sebagai salah satu aspek yang terkait dalam *human capital investment* sehingga dalam jangka panjang akan menjadi salah satu titik fokus yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pelayanan pendidikan yang baik akan menghasilkan keluaran SDM yang berkualitas dan mempunyai keunggulan kompetitif.
2. Struktur demografi nasional berubah ke struktur yang lebih menua berpengaruh terhadap jumlah penduduk usia pendidikan, sehingga menyebabkan menurunnya jumlah peminat dari luar daerah yang memilih Yogyakarta sebagai tujuan memperoleh pelayanan pendidikan.
3. Keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) di sisi lain mengakibatkan berkurangnya jumlah murid sekolah terutama untuk tingkat dasar.

Proyeksi Keberhasilan

1. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan nonformal.
2. Meningkatnya kelulusan sekolah dasar dan menengah hingga mendekati angka 100 persen.
3. Terlaksananya program wajib belajar 12 tahun sehingga pendidikan minimal masyarakat Kota Yogyakarta adalah setara sekolah menengah.
4. Menurunnya tingkat buta aksara hingga mendekati angka nol persen.
5. Adanya fasilitas taman pendidikan luar sekolah yang modern dan lengkap yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan.

C. Keluaran

1. Mewujudkan pembangunan pendidikan di Kota Yogyakarta yang dapat dinikmati oleh semua kalangan.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah, penuntasan wajib belajar 12 tahun.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan non formal yang sejajar dengan pendidikan formal.
4. Peningkatan kualitas ketrampilan, kemampuan edukasi, akademik dan tingkat kesejahteraan tenaga kependidikan sesuai dengan kemampuan daerah.
5. Pengembangan pendidikan pra sekolah sebagai wahana sosialisasi awal pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang dikembangkan di sekolah lanjut.
6. Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan antar lembaga pendidikan.
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan yang sesuai dengan pasar kerja.

2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA YOGYAKARTA

Berdasarkan sintesa hasil analisis prediksi kondisi umum Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, secara umum Kota Yogyakarta akan mengalami perubahan geomorfologi dan lingkungan hidup. Perubahan geomorfologi sebagai faktor yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan karena letak geografis Kota Yogyakarta yang berdekatan dengan Gunung Merapi yang masih aktif serta posisi wilayah yang berada di dekat garis patahan bumi. Kualitas lingkungan hidup akan terus menurun jika tidak diantisipasi sejak dini. Ketersediaan sumber daya alam juga semakin menurun akibat eksploitasi dan eksplorasi. Pencemaran air, udara dan tanah akan bertambah seiring dengan kemajuan pembangunan dan perubahan pola hidup masyarakat. Selain pencemaran tersebut, Kota Yogyakarta menghadapi ancaman krisis energi dan krisis air bersih.
2. Seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk dan peningkatan kebutuhan tempat hunian, dalam waktu 20 tahun ke depan di Kota Yogyakarta akan terjadi perubahan pola hidup masyarakat terkait dengan pemilihan dan bentuk tempat tinggal dan hunian. Munculnya permukiman

liar dan permukiman kumuh di lahan yang seharusnya bukan untuk tempat tinggal menjadi kenyataan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

3. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2005 adalah sebesar 519.008 orang, terdiri dari 266.373 laki-laki (51,32 persen) dan 252.635 perempuan (48,68 persen). Prediksi jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2007 adalah sebesar 529.388 orang. Prediksi jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2011 adalah sebesar 532.649 orang. Prediksi jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 548.174 orang, kemudian tahun 2021 sebesar 563.699 orang. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kota Yogyakarta diprediksi sebesar 579.224. Pertumbuhan penduduk diperkirakan kurang dari 1 persen per tahun.
4. Angka kepadatan penduduk pada tahun 2025 diprediksi akan mencapai sebesar 17.822 orang per Km². Prediksi angka kepadatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2007 adalah sebesar 16.289 orang per Km², sedangkan pada tahun 2011 adalah sebesar 16.389 orang per Km², tahun 2016 sebesar 16.867 orang per Km², tahun 2021 sebesar 17.345 orang per Km².
5. Komposisi penduduk diprediksi akan mengalami bentuk piramida terbalik yang berarti penduduk usia tua lebih banyak dari usia muda dan anak-anak. Kota Yogyakarta memiliki keadaan populasi penduduk yang menua.
6. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 diprediksi sebesar 17.376 orang atau sebesar 3 persen dari jumlah total penduduk. Prediksi jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 sebesar 55.928 orang, tahun 2016 sebesar 43.854 orang, dan tahun 2021 sebesar 31.000 orang.
7. Jumlah pengangguran pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 20.966 orang atau 4 persen dari total jumlah penduduk. Prediksi jumlah pengangguran pada tahun 2011 sebesar 28.091, tahun 2016 sebesar 26.643, tahun 2021 sebesar 23.901.
8. Komposisi penduduk di lihat dari aspek pendidikan akan membaik seiring dengan dilaksanakannya program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2006.
9. Pertumbuhan ekonomi untuk kurun waktu 20 tahun ke depan diprediksi akan berada pada kisaran angka 4 sampai 7 persen. Prediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 5,63 persen, tahun 2016 sebesar 6,25 persen, tahun 2021 sebesar 6,88 persen dan tahun 2025 sebesar 7,5 persen.
10. Laju inflasi untuk kurun waktu 20 tahun ke depan diprediksi akan berada pada kisaran angka 4 sampai 9 persen.

11. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 direncanakan minimal sama atau melebihi target nasional.
12. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Yogyakarta ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang rendah di bawah 1 persen.
13. Ekonomi kerakyatan berupa usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) masih akan tetap mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
14. Sejalan dengan pelaksanaan kesepakatan *Asean Free Trade Area* (AFTA), maka pada tahun 2025 Kota Yogyakarta akan dihadapkan pada masuknya perusahaan dan produk asing. Persaingan usaha antara pengusaha lokal dengan pengusaha nasional dan asing akan semakin tinggi.
15. Kebutuhan terhadap konsumsi energi, air bersih, udara bersih dan komunikasi akan sangat tinggi pada tahun 2025.
16. Secara umum, kehidupan sosial, budaya, keagamaan dan politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 20 tahun ke depan masih sangat kondusif, meskipun pada beberapa sisi akan terjadi pergeseran sosial.
17. Penurunan nilai-nilai dan tradisi lokal yang berbasis pada budaya Jawa diperkirakan akan terus terjadi, namun akulturasi budaya Jawa dengan budaya lain termasuk budaya asing akan terus berlangsung. Budaya Jawa akan tetap eksis di masyarakat dan mengalami penyesuaian-penyesuaian.
18. Kota Yogyakarta akan menjadi pilihan utama pariwisata domestik maupun asing. Namun diprediksi akan terjadi pergeseran orientasi kepariwisataan di Yogyakarta.
19. Pada tahun 2025, Kota Yogyakarta akan mengalami proses aglomerasi yang semakin membebani daya dukung infrastruktur, sosial dan lingkungan hidup perkotaan. Kepadatan aktivitas sosial ekonomi di wilayah Kota Yogyakarta semakin tinggi.
20. Ruang publik yang terdiri dari ruang terbuka dan ruang tertutup sebagai tempat melakukan interaksi sosial warga seperti aktivitas bermain, rekreasi warga dan ruang pertemuan yang semakin sempit sehingga diperlukan pengelolaan secara optimal.

21. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) sebagai bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika akan semakin meningkat, karena diperlukan untuk menyeimbangkan kondisi udara akibat pencemaran danantisipasi semakin berkurangnya ruang terbuka akibat pembangunan fisik.
22. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pemanfaatan *e-government* akan semakin intensif. Perubahan kultur birokrasi akan terjadi akibat diadopsinya pendekatan baru dalam manajemen sektor publik.
23. Pelayanan publik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang. Layanan informasi pelayanan publik semakin mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai media.
24. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan akan terjadi perubahan pola pendidikan seiring dengan kemajuan teknologi. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti *e-learning*, *e-book* dan sebagainya akan semakin luas terjadi di Kota Yogyakarta.
25. Jumlah SMA dan SMP secara kuantitatif diprediksi akan berkurang untuk sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan seiring dengan berkurangnya jumlah SD sejak tahun 1998. Demikian juga pada tahun 2025 jumlah perguruan tinggi di Yogyakarta secara kuantitas juga akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2005, tetapi secara kualitas akan terjadi peningkatan.
26. Tingkat kelulusan riil pendidikan SD, SLTP dan SLTA semakin meningkat mendekati 100 persen dan kualitas kelulusan semakin meningkat.
27. Peningkatan keahlian SDM Pemerintah sehingga terjadi peningkatan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2005 – 2025

3.1. VISI PEMBANGUNAN

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah kota, maka Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 adalah:

*Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,
Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa,
yang Berwawasan Lingkungan*

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005–2025 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam rangka menjadikan **"Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan"**.

Adapun yang dimaksud dengan **"Kota Pendidikan Berkualitas"** adalah :

1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara;
2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi;
3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (*Intelligensia Quotient*), emosional (*Emotional Quotient*) dan spiritual (*Spiritual Quotient*);
4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul;

5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
6. Menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif.

"Pariwisata Berbasis Budaya" adalah :

1. Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain;
3. Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara;
4. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi dan wisata belanja;
5. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

"Pusat Pelayanan Jasa" adalah :

1. Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri;
2. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Jawa bagian Selatan;
3. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif;
4. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.

"Berwawasan Lingkungan" adalah :

1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan;
2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan;
3. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

3.2. MISI PEMBANGUNAN

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sebagai berikut:

1. **Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan** yaitu dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta mempunyai standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara, mempunyai keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi, kompetensi tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kota Yogyakarta; menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul; membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
2. **Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan** yaitu dengan meningkatkan objek dan daya tarik wisata; menampilkan *landmark (tetenger/ciri monumental)* dan budaya khas Kota Yogyakarta serta nilai-nilai luhur budaya bangsa; mengembangkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak; membangun sarana dan prasarana wisata yang memadai; menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata kota; meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat kota dalam pengembangan pariwisata; melakukan promosi dan pemasaran wisata yang efektif, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.
3. **Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa** melalui peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dengan memperkuat perekonomian kota berbasis keunggulan masing-masing sektor andalan menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat kota terhadap berbagai

pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, sehingga dapat menjadi pusat pelayanan jasa di wilayah Jawa bagian Selatan.

4. **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan** dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
5. **Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya** melalui peningkatan integritas setiap pribadi masyarakat kota, memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; patuh dan taat aturan hukum; memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar umat beragama; mengembangkan semangat kekeluargaan; menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama; melaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kota Yogyakarta; dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kota Yogyakarta dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan kota.
6. **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum** dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat kota; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya

tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil.

7. **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai** melalui penciptaan kondisi yang kondusif, pemeliharaan dan penjaminan situasi yang aman, tertib, nyaman dan damai dengan memanfaatkan semua komponen masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun stabilitas keamanan dan penciptaan ketertiban kota;
8. **Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas** melalui pembangunan infrastruktur yang maju dengan meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; peningkatan daya dukung kapasitas kota dengan pengembangan dan pemanfaatan aset-aset daerah, sarana dan prasarana kota serta fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat;
9. **Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat** melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik; kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat kota yang mantap; penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan mempunyai kompetensi yang tinggi serta didukung oleh partisipasi masyarakat.

3.3. ARAH PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan visi "**Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan**" sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju Kota Yogyakarta yang sejahtera adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan dalam arah dan sasaran pembangunan.

3.3.1. ARAH PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Arah Pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

A. Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas

Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dalam perkembangannya cenderung semakin memburuk karena beberapa faktor penyebab. Faktor eksternal berkombinasi dengan faktor internal menjadikan penurunan kredibilitas Kota Yogyakarta di sektor jasa pendidikan. Di samping berkembangnya jasa pendidikan yang berkualitas di kota-kota lain di Indonesia, faktor internal juga turut berperan dalam menurunkan citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan.

Merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kota yang banyak melibatkan pelajar dan mahasiswa, degradasi moral di kalangan pelajar dan mahasiswa pendatang, longgarnya kontrol masyarakat dan pemerintah sehingga berkembang isu kehidupan seks bebas, perubahan budaya di kalangan anak muda yang cenderung ke arah negatif menjadikan para orang tua enggan mengirimkan putra-putrinya menuntut ilmu di Kota Yogyakarta. Predikat Kota Pendidikan yang sudah melekat sejak lama merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang menjadi sektor basis perekonomian. Oleh karena itu, pembangunan jangka panjang sektor pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi, menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia, emosional dan spiritual sehingga menjadi primadona yang memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan kota ke depan untuk menjadi kota pendidikan terkemuka di Asia Tenggara, namun tetap dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan sektor pendidikan 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. Keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi, menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia, emosional dan spiritual, perlu dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang

unggul serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dengan didukung oleh atmosfer pendidikan yang kondusif.

3. Pembangunan pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Indonesia termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.
4. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat daerah dan nasional, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
5. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Di samping itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.
6. Pembangunan iptek diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta pengembangan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

B. Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan

Pembangunan sektor pariwisata 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta secara tradisi dikenal sebagai Kota Budaya. Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai salah satu patron budaya Jawa berada di wilayah Kota Yogyakarta dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dengan demikian Kota Yogyakarta, yang dalam sejarahnya merupakan ibukota kasultanan mengemban predikat sebagai pusat budaya Jawa dan oleh karenanya dikenal sebagai Kota Budaya. Berbagai koleksi dan peninggalan masa lalu masih banyak ditemukan dan terpelihara di Yogyakarta. Beberapa tradisi, upacara adat, kegiatan budaya dan pertunjukan seni masih terjaga dan beberapa telah dikembangkan sehingga menjadi salah satu atraksi yang menarik. Dengan berbagai potensi budaya, keraton dan objek wisata lainnya Kota Yogyakarta menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat menarik. Bahkan dalam perkembangannya, Kota Yogyakarta diharapkan menjadi kota tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. Selain itu, Kota Yogyakarta juga diharapkan dapat menjadi salah satu kota tujuan wisata budaya, wisata bangunan sejarah, wisata belanja, wisata pendidikan dan wisata konvensi dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.
2. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian. Pengalaman dari beberapa kota di Indonesia dan juga di belahan dunia yang lain menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata yang baik akan memberikan pengaruh yang positif dalam perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan sektor lain yang terkait dengan sektor pariwisata. Potensi budaya dan pariwisata di Kota Yogyakarta dalam periode 20 tahun ke depan harus dapat dikembangkan sehingga menunjang posisi kota sebagai salah satu tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek wisata, sarana dan prasarana kepariwisataan, serta mengembangkan daya tarik wisata yang ada di Kota Yogyakarta. Pemerintah kota diharapkan dapat menjadi fasilitator bagi pelaku wisata untuk bersama-sama mengembangkan kepariwisataan serta

memberikan jaminan keamanan bagi dunia kepariwisataan Kota Yogyakarta.

4. Pembangunan sektor pariwisata dalam jangka panjang diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Kota Yogyakarta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan potensi keragaman pesona budaya dan potensi alam secara arif dan berkelanjutan serta dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya lokal.

C. Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa

Kemampuan sektor basis yang berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran Kota Yogyakarta. Daya saing yang tinggi pada sektor jasa akan menjadikan perekonomian Kota Yogyakarta siap menghadapi tantangan-tantangan persaingan dengan daerah yang lain dan mampu memanfaatkan peluang yang ada.

Untuk memperkuat daya saing tersebut, pembangunan Kota Yogyakarta sektor jasa dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut:

1. Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif sektor jasa sebagai motor penggerak utama didukung oleh keunggulan sektor pendukung terkait dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan publik dalam bentuk kebijakan dan fasilitasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
2. Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri serta memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Jawa bagian Selatan.
3. Menyediakan SDM berkualitas dan berkompentensi tinggi dalam rangka mendukung sektor jasa agar dapat berkembang lebih pesat;
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya untuk peluang-peluang penanaman modal di sektor jasa;
5. Membangun sistem, kelembagaan dan infrastruktur perekonomian yang maju serta melakukan reformasi perijinan dan kemudahan berinvestasi serta dukungan insentif perpajakan dan retribusi daerah.
6. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga terjamin

kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah.

7. Peranan pemerintah sebagai fasilitator, regulator, mediator, inovator sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat diarahkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing.
8. Pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal. Selain itu, pekerja didorong untuk meningkatkan produktivitas, sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
9. Mendorong ekspor produk-produk lokal untuk mendukung perekonomian rakyat agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi.
10. Pengembangan UKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu, pengembangan UKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM.

D. Kota Yogyakarta yang Nyaman dan Ramah Lingkungan

Pembangunan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut :

1. Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena itu untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan maka lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan

wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan kota.

2. Menjaga dan melestarikan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
3. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Kota Yogyakarta. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi. Hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dengan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
4. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Kebijakan pengelolaan SDA perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; pemerintahan kota yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan

perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

6. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Kebijakan ini diarahkan terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya

Pembangunan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut:

1. Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya luhur yang dimiliki Kota Yogyakarta memberikan arah bagi perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Jawa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kehidupan.
2. Kehidupan beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan kota, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat kota yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
3. Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat Kota Yogyakarta ditujukan untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur budaya Jawa, seperti religius, kebersamaan dan persatuan, dan nilai modern yang universal, seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan

yang baik. Pembangunan jati diri tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya Jawa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun.

4. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar bangsa Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersamaan dengan mengarahkan budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.

F. Kota Yogyakarta yang *Good Governance, Clean Government, Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum*

Pembangunan Kota Yogyakarta yang *good governance, clean government*, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut :

1. Kota Yogyakarta yang *good governance, clean government*, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum adalah landasan penting untuk tercapainya keberhasilan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan adil. Demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat serta akan terwujud transparansi publik. Akuntabilitas publik dan transparansi merupakan kata kunci menuju terciptanya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan aturan hukum di tingkat daerah pada dasarnya bermanfaat untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dari berbagai sisi kehidupan masyarakat dan menghambat aspek negatif dari berbagai sisi kehidupan masyarakat. Jaminan penegakan perda yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi potensi masyarakat secara maksimal. Untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang demokratis dan adil dilakukan dengan praktek pemilihan walikota secara langsung yang lebih demokratis, memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat

partisipasi dan peran masyarakat; peningkatan kualitas pelaksanaan amanat desentralisasi dan otonomi daerah yang dilimpahkan pemerintah pusat; menjamin pengembangan media dan kebebasan media di daerah dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat kota; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya taat dan tertib hukum dan bersama komponen yang berwenang menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil.

2. Penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah kota yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah kota yang profesional, efektif, berkompentensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Efektivitas kerja yang tinggi dari setiap satuan kerja perangkat daerah akan menghasilkan kinerja pelayanan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kinerja pelayanan yang tinggi dalam jangka panjang akan mewujudkan *good governance*. Untuk mewujudkan *good governance* beberapa kebijakan yang harus dilakukan antara lain (a) mempromosikan dan mensosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah konstitusi yang kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan; (b) menata hubungan antara kelembagaan politik dengan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara; (c) meningkatkan kinerja SKPD dan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh peraturan daerah; (d) memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; (e) menciptakan pelembagaan demokrasi lebih lanjut untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.
3. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah, serta penguatan lembaga legislatif.
4. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui (a) penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama

penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, nilai-nilai kesetaraan gender, anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media; (b) upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

5. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan (a) mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen; (b) menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (c) menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh *link* informasi yang ada di wilayah Kota Yogyakarta sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa; (d) memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman informasi.
6. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
7. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang bersih pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan

fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.

G. Kota Yogyakarta yang Aman, Tertib, Bersatu dan Damai

Pembangunan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut :

1. Gangguan keamanan dalam bentuk berbagai variasi kejahatan dan potensi konflik horisontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.
2. Pembangunan pada sektor keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum beserta institusi terkait dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dicapai melalui pembangunan kompetensi pelayanan inti, pembinaan SDM, pemenuhan kebutuhan sarana utama serta membangun pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum. Peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat akan dibangun melalui mekanisme jaring pengaman masyarakat yang berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
4. Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat akan mendukung meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, juga akan mengurangi gangguan keamanan serta menghapuskan potensi konflik sosial.

H. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya diarahkan pada: (i) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang

berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan efisien; (ii) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (iii) pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

2. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui *political trading* yang saling menguntungkan; menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar moda angkutan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; menyelaraskan semua peraturan daerah baik yang mencakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkenan; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya; menghilangkan segala macam bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa; mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat; menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks *global services*; membangun fasilitas angkutan publik untuk daerah perkotaan.
3. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan ruang publik perlu diperluas dan melibatkan peran aktif masyarakat termasuk para pengusaha.

I. Kota Yogyakarta Sehat

Pembangunan Kota Yogyakarta sehat dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut :

1. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi

- penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek dan globalisasi dengan semangat kemitraan serta kerjasama lintas sektor.
2. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, upaya promotif dan preventif terhadap berbagai jenis penyakit. Pendidikan masyarakat untuk menjalankan hidup sehat perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan masalah kesehatan.
 3. Pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) perlu disosialisasikan terutama kepada generasi muda melalui berbagai media maupun penyuluhan-penyuluhan. Dengan upaya yang sama, pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS juga perlu dilakukan.
 4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran obat-obatan, kosmetika, alat-alat kesehatan dan makanan.

3.3.2. SASARAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA

Sebagai ukuran tercapainya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, maka pembangunan jangka panjang dalam 20 tahun mendatang difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- A. Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,** ditunjukkan oleh:
1. Meningkatnya kualitas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah.
 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal.
 3. Tingginya tingkat kelulusan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 4. Tercapainya program wajib belajar 12 tahun sehingga pendidikan minimal masyarakat Kota Yogyakarta adalah setara dengan Sekolah Menengah.
 5. Rendahnya tingkat buta aksara.
 6. Tersedianya fasilitas pendidikan yang modern dan lengkap serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan, ditunjukkan oleh:

1. Meningkatnya jumlah dan lama tinggal kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
2. Meningkatnya infrastruktur dan layanan wisata yang profesional.
3. Berkembangnya obyek wisata potensial sebagai bagian dari paket wisata yang terintegrasi.
4. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya secara berkesinambungan yang berbasis pada budaya lokal.
5. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.

C. Terwujudnya Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa, ditunjukkan oleh:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 direncanakan minimal sama atau melebihi target nasional.
2. Tingkat pengangguran 4 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 3 persen.
3. Kualitas SDM yang semakin meningkat, termasuk peran perempuan (partisipasi, akses dan kontrol perempuan) dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang rendah di bawah 1 persen.
4. Terbangunnya struktur perekonomian kota yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi diharapkan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditi berkualitas dengan produktivitas yang tinggi serta sektor jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing tinggi.

D. Terwujudnya Kota Yogyakarta yang Nyaman dan Ramah Lingkungan, ditandai oleh:

1. Meningkatnya kenyamanan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
2. Rendahnya tingkat pencemaran air, tanah dan udara.

3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

E. Terwujudnya Masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya, ditandai oleh:

1. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek.
2. Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian.
3. Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari.

F. Terwujudnya Kota Yogyakarta yang *Good Governance, Clean Government, Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum*, ditunjukkan oleh:

1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, aspiratif dan perspektif gender.
2. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik lokal yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri dan berkeadilan gender.
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan kota.
4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan bebas dari praktek-praktek KKN.
5. Terwujudnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan.
6. Terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi dengan didukung aparatur pemerintah yang profesional dan berkompentensi tinggi.
7. Terwujudnya tata pemerintahan yang mencerminkan komitmen dan integritas terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

G. Terwujudnya Kota Yogyakarta yang Aman, Tertib, Bersatu dan Damai, yang ditandai oleh:

1. Rendahnya tingkat kriminalitas.
2. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi.
3. Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, tenang dan damai.
4. Tingkat partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban.
5. Berkurangnya/menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak baik di dalam maupun di luar rumah tangga, baik fisik, seksual maupun psikis.

H. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, ditandai oleh:

1. Tersusunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antar moda berbasis pada efisiensi dan berkeadilan. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk tingkat elektrifikasi rumah tangga dan dunia usaha yang tinggi. Terselenggaranya teknologi komunikasi yang efisien dan modern guna terciptanya Kota Yogyakarta sebagai *cyber city* terkemuka di Indonesia.
2. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana publik yang mantap di sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan dan energi.
3. Tingkat aksesibilitas sarana dan prasarana publik berdasarkan asas keadilan sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata ke segenap lapisan masyarakat.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan.
5. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel serta terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

6. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi keluarga.

I. **Terwujudnya Kota Yogyakarta Sehat**, ditandai oleh:

1. Meningkatnya gaya hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat yang diukur dari rendahnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya status gizi masyarakat, rendahnya tingkat prevalensi penyakit degeneratif dan penyakit menular termasuk HIV/AIDS.
2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan serta perlindungan kesehatan (*universal coverage insurance*) terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kesehatan reproduksi perempuan.
3. Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan perumahan serta ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan rumah tangga.
4. Rendahnya tingkat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza).
5. Rendahnya tingkat pelanggaran terhadap peredaran obat-obatan, kosmetika, alat-alat kesehatan dan makanan.

3.3.3. SASARAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN

Agar ada tahap-tahap yang jelas menuju tercapainya visi Kota Yogyakarta tersebut, maka ditetapkan sasaran pembangunan lima tahunan pada bidang pendidikan, pariwisata dan pelayanan jasa sebagai berikut:

Pendidikan :

1. 2007 – 2011 Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan dukungan SDM unggul
2. 2012 – 2016 Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan dukungan infrastruktur modern
3. 2017 – 2021 Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan dukungan standar mutu internasional
4. 2022 – 2025 Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan dukungan teknologi mutakhir

Pariwisata :

1. 2007 – 2011 Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan keragaman objek dan daya tarik wisata
2. 2012 – 2016 Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan pelestarian dan pengembangan seni serta pelestarian cagar budaya
3. 2017 – 2021 Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan manajemen yang profesional
4. 2022 – 2025 Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan jaringan pemasaran global

Pelayanan Jasa :

1. 2007 – 2011 Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan peran serta masyarakat
2. 2012 – 2016 Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan sistem informasi pelayanan publik
3. 2017 – 2021 Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan infrastruktur global
4. 2022 – 2025 Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan jaringan bisnis internasional

Sasaran Pembangunan Lima Tahunan ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan tahapan tersebut di atas.

3.3.4. PERAN SUB WILAYAH PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025, maka penataan ruang dan wilayah dalam 20 tahun ke depan Kota Yogyakarta diarahkan bagi terwujudnya keserasian, kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah dengan mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan fungsi pengembangan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Terciptanya kehidupan kota yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta berkelanjutan sesuai dengan tata nilai Yogyakarta Berhati Nyaman;

2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
3. Terciptanya kehidupan sosial budaya kota yang menghargai tradisi, perilaku, dan tatanan yang bersumber pada nilai “Mangayu Hayuning Bawono”, dengan mempertahankan, meningkatkan atau menciptakan ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
4. Meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi serta meratanya pendapatan seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu.

Selain itu pola pemanfaatan ruang wilayah menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan inti dan penyangga sedangkan kawasan budidaya terdiri atas kawasan budidaya pertanian dan non pertanian.

Kawasan inti adalah kawasan yang mempunyai nilai budaya, sejarah, maupun nilai-nilai lain yang menunjukkan pentingnya kawasan tersebut untuk dilestarikan. Pemanfaatan ruang kota dalam kawasan inti ini sepenuhnya harus sejiwa dengan kehidupan kawasan.

Kawasan penyangga adalah kawasan yang secara langsung berhubungan dengan kawasan inti. Pemanfaatan ruang kota dalam kawasan penyangga didasarkan pada keterkaitan fungsi dan sejarah dari kawasan penyangga dan kawasan inti.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Dikaitkan dengan pengembangan kawasan tersebut Pembentukan Citra Kota bertujuan untuk menciptakan kesan khusus yang berbeda dengan kota lain sehingga dapat meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung dengan sasaran mempertahankan dan atau memperkuat komponen fisik pembentuk citra kota.

Pembentukan citra kota yang berkaitan dengan komponen fisik pembentuk citra kota terdiri dari jalur (*path*), simpul (*node*), pembatas (*edge*), blok lingkungan (*district*) dan *tetenger* (*land mark*), diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Kriteria untuk menentukan komponen fisik yang mempunyai citra kota sebagai inti pelestarian didasarkan pada:

- a. Nilai filosofi dan atau religius-kultural.
- b. Nilai sejarah perjuangan bangsa.
- c. Nilai semangat dan wawasan kebangsaan.
- d. Nilai seni, keindahan dan sifat khas.
- e. Nilai arkeologi.

Kriteria untuk menentukan citra kota sebagai inti pengembangan didasarkan pada:

- a. Akar filosofi dan atau religius-kultural.
- b. Akar budaya.
- c. Masyarakat.
- d. Peluang pengembangan ekonomi.

Kriteria untuk menentukan penyangga citra kota adalah sesuai dengan sifat inti.

BAB IV PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan Kota Yogyakarta, merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun ke depan.

RPJPD ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya selama periode tersebut. Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi "**Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan**" perlu didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan Daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) (3) Konsistensi kebijakan pemerintah kota; (4) Keberpihakan kepada ekonomi rakyat; dan (5) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan (*check and balance*) serta akuntabilitas publik yang baik; dan (7) Dukungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat.

Yogyakarta, 27 April 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO